

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH PORNOGRAFI  
PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN  
2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Islam Jurusan Hukum  
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**SHOLIKHUL JADIID**  
**NIM:21790215631**

**Pembimbing I**  
**Dr. Hajar Hasan, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2019/1441 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama	Sholikhul Jadiid
Nomor Induk Mahasiswa	21790215631
Gelar Akademik	M.H. ( Magister Hukum)
Judul	Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam

Tim Penguji

**Dr. Andi Murniati, M.Pd**  
Ketua

**Dr. Masrun, MA**  
Sekretaris

**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
Penguji I

**Dr. Zulkayandri, M. Ag**  
Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan 19 November 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Sholikhul Jadiid**  
NIM : **21790215631**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)**

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 19 November 2019.

Penguji I

**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

Tgl:

Penguji II

**Dr. H. Zulkayandri, M.Ag**  
NIP. 197101051995031002

Tgl:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "**Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Sholikhul Jadiid**  
NIM : **21790215631**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 19 November 2019.

Pembimbing I

**Dr. Hajar Hasan, M.Ag**  
NIP. 1958071219860310005

Tgl:

Pembimbing II

**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

Tgl:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam.”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Sholikhul Jadiid**  
NIM : 21790215631  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 25 September 2019  
Pembimbing I,




**Dr. Hajar Hasan, M.Ag**  
NIP. 1958071219860310005

Tanggal: 25 September 2019  
Pembimbing II,



**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Hajar Hasan, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

### NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara  
Sholikhul Jadiid

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Sholikhul Jadiid
NIM	: 21790215631
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul	: Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang munaqasyah Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum WrWb

Pekanbaru, 25 September 2019  
Pembimbing I

  
**Dr. Hajar Hasan, M.Ag**  
NIP. 1958071219860310005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal :Tesis Saudara  
Sholikhul Jadiid

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: <b>Sholikhul Jadiid</b>
NIM	: 21790215631
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul	: Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 25 September 2019  
Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

**Dr. Junaidi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Sholikhul Jadiid  
NIM : 21790215631  
Tempat/tanggal lahir : Sumber Makmur/13 Maret 1994  
Program studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau Menurut Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari dditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia bersedia menerima snksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 September 2019



**SHOLIKHUL JADIID**  
Nim: 21790215631

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji Syukur atas Kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, *Shalawat* serta salam senantiasa juga penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad saw *khatamul anbiya'i walmursalin*.

Tesis ini berjudul **“PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH PORNOGRAFI PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah swt, serta bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua Ayahanda (M. Sururi) dan Ibunda (Siti Anwaroh), dan Adik-Adikku yang aku sayangi (Oki, Bayu, Kinan, Nafil, A'ad, dan Afa), keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan Tesis ini.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Promotor II bagi tesis saya, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan izin dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini..

5. Bapak Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag, selaku Promotor I saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.

Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT dan semoga senantiasa sehat *wal afiat*, dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, Amin.

Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2017  
Semoga sehat selalu dan sukses terimakasih atas segala kebersamaannya





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini selagi menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UIN SUSKA..

Kawan-kawan seperjuanganku di Kota Pekanbaru, Ridwan, Edi Irwansyah, Anggriani, Rahmat, Suharli, Furqan, dan yang lainnya. Semoga sehat selalu dan sukses.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, menjadi amal jariyah disisi Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermamfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 25 September 2019

Penulis,

**SHOLIKHUL JADIID**  
NIM : 21790215631

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Pengesahan Tim Munaqasyah</b>	
<b>Pengesahan Penguji</b>	
<b>Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing &amp; Ketua Prodi</b>	
<b>Nota Dinas</b>	
<b>Surat Pernyataan</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Daftar Singkatan</b> .....	vi
<b>Tranlitras Arab Latin</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	12
C. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	16
1. Identifikasi Masalah .....	16
2. Batasan Masalah .....	16
3. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pornografi.....	19
1. Defenisi Pornografi .....	19
2. Ruang Lingkup Pornografi.....	24
3. Pengaruh Pornografi.....	28
4. Undang-Undang Pornografi .....	31
5. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam.....	36

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	41
1. Pengertian Anak Menurut Islam dan Undang-Undang.....	42
2. Hak Anak dalam Ketentuan Perundang-undangan .....	45
3. Perlindungan Anak dalam Islam .....	48
C. Hukum Islam .....	52
1. Pengertian Hukum Islam, Syariat, Fikih dan <i>Qânûn</i> .....	52
2. Ruang Lngkup Hukum Islam .....	58
3. Sumber Hukum Islam .....	60
4. Tujuan Hukum Islam ( <i>Maqâsid al-Syari'ah</i> ).....	65
D. Tinjauan Pustaka yang Relevan .....	75

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	81
B. Sumber Data.....	82
C. Metode Pengumpulan Data .....	84
D. Teknik Analisis Data.....	84

## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Esensi Perlindungan Anaka pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	86
B. Konsep Perlindungan Anak yang ditawarkan Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	102
C. Analisis hukum Islam perlindungan anak Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	116

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	145

## Daftar Pustaka



## DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (Penyakit)
DPK	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (Penyakit)
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RU	: Rancangan Undang-Undang
RUUP	: Rancangan Undang-Undang Pornografi
SAW	: <i>Shalallahu 'Alaihi Wasalam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Pornografi
QS	: Quran Surat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Wa
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدَّة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------------	--------------------	------------------------

### Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عَلَةٌ	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
--------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### Vokal pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	a
كَسْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
دَمَمٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

### Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ أَعَدْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

### Kata sandang alif + lam

3. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

4. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### ABSTRAK

#### **Sholikhul Jadiid (2019): Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Akhir-akhir ini perkara pornografi (asusila) telah menjadi sebuah permasalahan yang pelik di masyarakat. Hal ini mengakibatkan pentingnya andil setiap orang untuk bersama-sama menangani masalah ini. Pornografi selain dapat merusak kesehatan dan dampak negatif lainnya terutama bagi anak-anak, ternyata banyak kasus kejahatan seksual dilatarbelakangi pelaku merupakan adiktif pornografi, tentunya hal ini sangat memperhatikan bagi bangsa kita sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila. Fenomena ini membuat pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan tentang pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008, yakni UU No 44 Tahun 2008. Produk hukum ini memiliki cakupan pembahasan hukum yang komplit terkait perkara pornografi tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang tidak mengkaji kata pornografi secara langsung dalam pembahasannya. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga secara khusus memuat peraturan tentang perlindungan anak.

Dari permasalahan di atas, tesis ini berisikan analisis hukum Islam terkait filosofi Undang-undang Pornografi tersebut menggunakan kacamata *maqâsid al-syari'ah*, terkhusus dalam persoalan perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 15. Adapun rumusan masalah tesis ini ialah: (1) Apa esensi perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (2) Bagaimana konsep perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (3) Bagaimana analisis hukum Islam mengenai kewajiban melindungi anak dari pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menggunakan pendekatan *statute aproach* dan pendekatan *conceptual aproach*. Pendekatan *statute aproach* (perundang-undangan) dilakukan dengan cara meneliti aturan peundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak, terkhusus dari masalah pornografi dan hal ini dibahas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Sedangkan pendekatan *conceptual aproach* dilakukan dari sudut kajian *maqâsid al-syari'ah*.

Hasil penelitian ini *Pertama*, Esensi perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi relevan dengan 3 landasan pembentuknya Undang-Undang Pornografi: 1) Filosofis, untuk mempertegas bahwa Indonesia negara berdasarkan pancasila, beradap dan menjunjung tinggi norma susila serta norma agama, 2) Sosiologis, Melarang pornografi sebab memberidampak buruk bagi warga negara terkhusus untuk anak-anak dan generasi muda, 3) Yuridis, untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. *Kedua*, Konsep perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur pada Bab Perlindungan Anak Undang-Undang Pornografi dan bertujuan untuk menjaga anak-anak Indonesia dari eksploitasi seksual dan juga kejahatan pornografi lainnya. *Ketiga*, analisis hukum Islam mengenai perlindungan anak dari pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan *maqâsid al-syari'ah* ialah untuk melindungi kemaslahatan anak itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

صليخول جديد (٢٠١٩): حماية الأطفال من آثار المواد الإباحية في المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 2008 بشأن المواد الإباحية التي تمت مراجعتها بموجب الشريعة الإسلامية

في الآونة الأخيرة أصبحت قضية المواد الإباحية (غير أخلاقية) مشكلة معقدة للغاية في المجتمع. هذا الشرط يدعو الجميع للمشاركة في الجهود المبذولة للتغلب على هذه المشكلة. إلى جانب أن المواد الإباحية يمكن أن تلحق الضرر بالصحة وغيرها من التأثيرات السلبية خاصة على الأطفال ، فقد تبين أن العديد من حالات الجرائم الجنسية ضد الجناة هي مواد إباحية تسبب الإدمان ، وهذا بالطبع مصدر قلق كبير لأمتنا كدولة تعتمد على Pancasila. أدت هذه الظاهرة إلى قيام الحكومة الإندونيسية بإصدار قانون المواد الإباحية في 30 أكتوبر 2008 ، أي القانون رقم 44 لعام 2008. لا ينظم هذا المنتج القانوني المواد الإباحية بشكل عام فحسب ، بل ينظم أيضًا حماية الأطفال من جميع المسائل المتعلقة بالمواد الإباحية.

من المشكلات المذكورة أعلاه ، تحتوي هذه الرسالة على تحليل للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بفلسفة قانون المواد الإباحية باستخدام عدسة المقشيد الشريعة ، وخاصة في مسألة حماية الطفل الواردة في المادة 15. وصياغة مشكلة هذه الرسالة هي: (1) ما هو جوهر حماية الطفل المادة 15 من القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية ، (2) ما هو مفهوم حماية الطفل في المادة 15 من القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية ، (3) كيف يتم تحليل الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالالتزام بحماية الأطفال من المواد الإباحية في المادة 15 من القانون القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري (قانوني معياري) له مقاربة قانونية ومفاهيمية. يتم تطبيق منهج القانون الأساسي (تشريع) لدراسة التشريعات المتعلقة بالالتزام بحماية الأطفال من المواد الإباحية في المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 2008. بينما يتم تطبيق منهج النظرية القانونية من منظور دراسة المقشيد الشريعة. نتائج هذه الدراسة أولاً ، جوهر حماية الطفل في المادة 15 من القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية بما يتماشى مع الأسس الثلاثة لقانون المواد الإباحية: (1) فلسفية ، للتأكيد على أن إندونيسيا تقع على البانثاسيلا ، تتكيف مع القواعد والمعايير الأخلاقية وتتمسك بها الدين ، (2) سوسيولوجي ، حظر الصور الإباحية لأنه يعطي تأثيرًا سيئًا على المواطنين خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ، (3) قانوني ، لتحقيق اليقين القانوني والعدالة. ثانيًا ، ينظم مفهوم حماية الطفل في المادة 15 من القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية في الفصل المتعلق بحماية الأطفال من قانون المواد الإباحية ، وهو يهدف إلى حماية الأطفال الإندونيسيين من الاستغلال الجنسي وغيره من الجرائم الإباحية. ثالثًا ، إن تحليل الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالالتزام بحماية الأطفال من المواد الإباحية في المادة 15 من القانون رقم 44/2008 بشأن المواد الإباحية المستندة إلى مقاصد الشريعة هو حماية مصلحة الطفل نفسه .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Sholikhul Jadiid (2019): Children Protection from the Effects of Pornography in Article 15 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Reviewed Under Islamic Law**

Lately the case of pornography (immoral) has become a very complicated problem in society. This condition invites everyone to take part in the effort to overcome this problem. Besides pornography can damage health and other negative impacts especially for children, it turns out that many cases of sexual crimes against the perpetrators are addictive pornography, of course this is very concern for our nation as a country based on Pancasila. This phenomenon led the Indonesian government to issue the Pornography Law on October 30, 2008, namely Law No. 44 of 2008. This legal product not only regulates pornography in general, but also specifically regulates the protection of children from all issues related to pornography.

From the above problems, this thesis contains an analysis of Islamic law related to the philosophy of the Pornography Law using *maqâsid al-shari'ah*, especially in the issue of child protection contained in Article 15. The formulation of this thesis problem is: (1) What is the essence of child protection Article 15 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, (2) What is the concept of child protection in Article 15 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, (3) How is the analysis of Islamic law regarding the obligation to protect children from pornography in Article 15 of the Law No. 44 of 2008 concerning Pornography.

This research is a normative legal research (normative juridical) with statute approach approach and approach conceptual approach. The statute approach approach (legislation) is carried out to examine the legislation related to the obligation to protect children from pornography in Article 15 of Law No. 44 of 2008. While the conceptual approach approach is carried out from the perspective of the study of *maqâsid al-shari'ah*.

The results of this research First, the Essence of child protection in Article 15 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography in line with the 3 foundations of the Pornography Law: 1) Philosophical, to emphasize that Indonesia is based on Pancasila, adapts and upholds moral norms and norms religion, 2) Sociological, Prohibiting pornography because it gives bad impact to citizens especially for children and young generation, 3) Juridical, to realize legal certainty and justice. Second, the concept of child protection in Article 15 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography is regulated in the Child Protection Chapter of the Pornography Act and aims to protect Indonesian children from sexual exploitation and other pornographic bad impact. Third, the analysis of Islamic law regarding the obligation to protect children from pornography in Article 15 of Law No. 44/2008 on Pornography based on the *maqâsid al-shari'ah* is to protect the benefit of the child himself.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 26 November 2008 Undang-Undang Pornografi disahkan dan diundangkan oleh pemerintah, maka berakhirlah polemik terkait pornografi yang bertahun-tahun menyita perhatian masyarakat kala itu. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Pornografi sangat mulia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 yakni sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan serta pendidikan dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
4. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks di masyarakat.<sup>2</sup>

Melihat tujuan diundangkannya UU Pornografi di atas dapat dipahami sebab pornografi merupakan perbuatan yang dapat mempengaruhi generasi muda

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), prakata hlm.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 3.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjerumus pada perilaku negatif. Banyak anak-anak dan juga perempuan khususnya menjadi korban kejahatan pornografi baik ia sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah perkara pidana. Selain itu pornografi berdampak pula terhadap perbuatan *a moral* lainnya seperti, perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, bahkan pembunuhan. Dengan lahirnya Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diharapkan mampu mencegah segala macam dampak buruk yang ditimbulkan oleh pornografi, terutama perlindungan hukum bagi anak-anak dan perempuan yang banyak menjadi korban kejahatan pornografi.<sup>3</sup>

Anak-anak di pedesaan pada umumnya dahulu ramai pergi ke masjid untuk mengaji ketika waktu magrib tiba, kegiatan itu merupakan proses pembelajaran yaitu penanaman nilai dasar keislaman ke dalam diri anak.<sup>4</sup> Kini *kaveling* transfer nilai dan pembentukan perilaku tersebut sudah diambil alih oleh berbagai media komunikasi modern dan juga internet yang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan primer di keseharian mereka. Akibatnya, anak lebih tertarik oleh acara TV dan sibuk pada *smart phone* dari pada di ajak pergi mengaji ke masjid ataupun mushala. Dan akibatnya perilaku anak banyak dipengaruhi oleh suguan dari teknologi informasi tersebut. Hingga akhirnya tidak memahami nilai-nilai ajaran Islam dengan sebaiknya. Tingkah laku mereka dalam keseharian pun terbentuk berdasarkan apa yang sering mereka saksikan pada jaringan televisi atau

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni 2010/17.

<sup>4</sup> Linda Rae Bennett and Sharym Graham Davies, *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia*, (London: Routledge, 2013), hlm. 51.

dan teknologi yang lainnya, terlebih para orang tua tentunya tidak mungkin dapat selalu mengawasi dan menfilter keseharian anak-anak mereka dari sesuatu yang berbentuk negatif hal itu termasuk segala perbuatan yang menjurus kepada pornografi.<sup>5</sup>

Pada tahap ini terjadilah pergeseran nilai dalam masyarakat. Sesuatu yang dahulu dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan tabu, seperti halnya memeluk lawan jenis yang bukan mukhrim, berkhawat atau berdua-duaan di tempat sepi menjadi sesuatu yang biasa. Akibatnya budaya barat yang membolehkan segala sesuatu terkait pergaulan antar lawan jenis terjadi di negara Indonesia, budaya itu dikenal dengan budaya serba boleh (*permisif*). Sesuatu yang dahulu dianggap asusila atau porno kini dianggap biasa. Hal seperti menikah disebabkan karena kecelakaan (hamil di luar nikah) dianggap sebagai suatu kewajaran. Ditinjau dari hukum Islam, fenomena yang terjadi tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip yang dibenarkan oleh Islam, karena Islam telah mengatur secara tegas bagaimana tata cara berperilaku serta bagaimana tata cara pergaulan bagi seorang muslim hal ini diatur dalam Quran surat an-nur ayat 30-31:<sup>6</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ

<sup>5</sup> Amany Lubis, dkk, *Loc. cit.*

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I, *ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS, An-Nur: 30-31).

Ayat di atas menegaskan bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari

Allah swt yang mesti dijaga oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan, dan



menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, drajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa, hal ini guna keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>7</sup> Ayat diatas juga didukung dengan surat al-Isra' ayat 32 yang secara tegas melarang perbuatan zina dalam Islam.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. *Al-Isra*': 32).”<sup>8</sup>

Masalah lain yang muncul ialah masyarakat menjadi cenderung berperilaku *apatis* (masa bodoh) pada persoalan terkait moral dan juga termasuk pornografi. Fenomena ini terjadi ada kaitannya dengan minimnya pemahaman masyarakat akan ilmu agama dan betapa berbahayanya pornografi itu sendiri.<sup>9</sup> hal yang demikian itu menunjukkan bahwa peran kontrol masyarakat terhadap pornografi sudah meredup dan hal ini akan sangat berbahaya bagi agama dan bangsa kita terutama untuk generasi muda. Hingga ketika para pendidik mendeklarasikan untuk menjauhi pornografi masyarakat menanggapi dengan acuh tak acuh. Hal ini disebabkan karena mereka sesungguhnya sudah setuju dengan pornografi itu sendiri dan tertanam pada (*frame*) pemikiran mereka. Pemikiran yang demikian ini lahir dari penyerapan hal-hal yang bersifat negatif yang ditayangkan di televisi atau media massa lainnya selama ini. Dan tentunya hal ini sangat bahaya dan

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 321.

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004).

<sup>9</sup> Amany Lubis, dkk, *Op. cit*, hlm. 117.

berdampak negatif untuk generasi penerus bangsa kita kedepannya karena pornografi dapat merusak sistem saraf otak manusia.<sup>10</sup>

Banyak orang beranggapan bahwa pornografi merupakan bagian dari modernisasi, padahal pola pikir yang demikian itu salah. Pornografi tepatnya disebut sebagai efek samping dari modernisasi. Hal yang harus kita lakukan adalah menggunakan modernisasi kearah yang baik. Kiblat modernisasi adalah bangsa Barat sehingga perilaku yang sudah jelas salah menurut Islam seperti perilaku LGBT<sup>11</sup> (*Lesbi, Gay, Biseks, Transgender*) yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi pada bangsa kita harus kita lawan dan hindari. Hal ini tak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya ajaran agama bagi kehidupan.<sup>12</sup>

Kehidupan yang baik seperti budaya hidup yang disiplin dan juga etos kerja yang baik serta budaya keilmuan yang tinggi serta budaya hidup jujur, itulah yang mestinya kita tiru dari dunia Barat. Sedangkan hal yang negatif seperti sex bebas dan gaya hidup yang cenderung liberal, dan segala hal yang menjurus pada perbuatan negatif mesti kita cegah. Pencegahan dari pengaruh negatif dari budaya barat dapat terlaksana dengan baik bila ada komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu membahu untuk menjaga bangsa yang kita cintai ini. Tanpa adanya kerjasama dan komitmen tersebut modernisasi dengan sendirinya akan dapat menggeser nilai budaya bangsa kita, terutama dalam norma agama dan norma susila. Indonesia merupakan negara berdasarkan

<sup>10</sup>Diani Hutabarat, *Konten Pornografi Bisa Merusak Sel-sel Otak*, (Keminfo: <https://kominfo.go.id>, Diupload 12 September 2018), diakses 01 Juli 2019.

<sup>11</sup>Linda Rae Bennett and Sharym Graham Davies, *Op. cit*, hlm. 203.

<sup>12</sup>Khabib Lutfi, *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*, (Bogor: Pustaka, 2018), hlm. 55.

Pancasila dan sangat menjunjung tinggi nilai agama dan nilai susila. Agama Islam merupakan agama yang komprehensif juga sekaligus agama yang *rahmatan lil alamin* dan penuh kasih sayang maka ia memerintahkan setiap muslim untuk mendidik dan melindungi anak dan juga termasuk menjaga seluruh keluarga mereka dari segala hal yang dapat menjerumuskan keluarga mereka ke dalam api neraka, Allah swt berfirman:<sup>13</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)”

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, Ayat ini memberi penjelasan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan bahkan seluruh anggota keluarga bertanggung jawab satu sama lain untuk saling mengingatkan dan memberi pengajaran agar tidak berbuat maksiat ataupun dosa, yang mana hal tersebut dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan hal tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *hâdanah*. *Hâdanah* bukan hanya berarti pemeliharaan anak, akan tetapi *hâdanah* juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan atau perlindungan

<sup>13</sup> Aidh Abdullah al-Qarni, *Cahaya Zaman, Terj.* (Jakarta: Al Qalam Gema Insani, 2006), hlm. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan juga termasuk pendidikan terhadap anak dari ia lahir hingga ia sanggup hidup mandiri atau berdiri sendiri (dapat menjaga diri dari perbuatan yang dapat memudharatkan diri sendiri).<sup>14</sup>

Berdasarkan telaah penulis dari berbagai sumber pornografi ini selain dapat merusak kesehatan terutama bagi anak-anak yang pola pikirnya sedang dalam proses pertumbuhan menuju dewasa, dan ternyata banyak kasus kejahatan seksual dilatarbelakangi pelaku merupakan adiktif pornografi. Dan pada tahun 2009, sebuah majalah di Amerika<sup>15</sup> yakni *American Demographic Magazine* mengungkapkan sebuah data tentang pornografi sebagai berikut, USA merupakan negara dengan penyumbang konten pornografi terbesar di dunia dengan mencapai 89% situs pornografi yang ada di dunia. Selanjutnya negara Inggris, Jerman, Australia Jepang dan Belanda menyusul dibelakangnya. Satu hal yang sangat mengejutkan dari data yang di rilis oleh majalah tersebut ialah ternyata 70% pengguna internet di dunia ini mengakses pornografi, dan pada tahun 2009 Indonesia menjadi negara no 7 dengan mengakses situs porno di dunia. Dan pada tahun 2012 Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai mengakses situs porno terbanyak di dunia setelah Amerika, Jepang dan Kanada. Menurut survey penikmat pornografi di Indonesia 75% nya ialah remaja dengan rentang usia 15-22 tahun.<sup>16</sup> Remaja pada saat itu begitu akrab dengan internet seolah kehidupan mereka tidak bisa lepas dari internet dan sosial media. Hal ini menjadikan mereka dengan

<sup>14</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 15.

<sup>15</sup> Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, (Jurnal Humanika Vol.6 No. 81, Maret 2006), hlm. 5.

<sup>16</sup> AS. Permana, *Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa di Kota Bandung*, (Artikel Karya Ilmiah; Universitas Widyatama, 2013).

mudah mendapatkan informasi apapun di internet termasuk pornografi. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan bagi bangsa kita sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila. Fenomena ini membuat pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008, yakni UU No 44 Tahun 2008 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 November 2008.<sup>17</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, ketentuan tentang pornografi terlebih dahulu diatur dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pasal 282, 283, dan 283bis, Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dari keseluruhan peraturan Perundang-undangan yang penulis sebutkan di atas tidak satupun yang memuat ketentuan yang jelas bagi tindak pidana pornografi.<sup>18</sup> Undang-Undang Pornografi mengatur dengan jelas dan komplit terkait persoalan pornografi termasuk di dalamnya terdapat bab khusus yang membahas tentang perlindungan anak dari ancaman pornografi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Pornografi yang bunyinya sebagai berikut,<sup>19</sup>

*“setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.*

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102-103.

<sup>18</sup> Firdaus Syam, *Loc. cit.*.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Grafindia Mandiri, 2008), hlm. 5.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan terkait kewajiban bagi setiap orang disini berlaku umum untuk siapa saja baik itu perorangan ataupun kelompok maupun organisasi. Dan bila ada seorang anak yang menjadi korban pornografi maka semua yang terkait di atas berkewajiban membimbing dan membina anak hingga pulih baik dari segi fisik maupun mental. Dalam penjelasan Pasal 15 ketentuan di atas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Regulasi tentang perlindungan anak dalam UUP juga diatur dalam beberapa pasal lainnya diantaranya Pasal 11, 16, 37, dan 38 yang merupakan ancaman bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak. Dan apabila terpidana terbukti melakukan tindak pidana pornografi terhadap anak yang kedudukannya sebagai korban maka ia akan dikenakan sanksi penambahan sebanyak sepertiga dari ancaman pidana maksimum.<sup>20</sup>

Meskipun secara keseluruhan peraturan pasal demi pasal dalam UUP sudah sejalan dengan prinsip Islam yang melarang pornografi namun masih terdapat beberapa penjelasan pasal yang tidak sejalan dengan hukum Islam diantaranya yakni penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6<sup>21</sup> yang merupakan pembolehan membuat, memiliki dan menyimpan pornografi untuk diri sendiri dan/atau kepentingan pribadi. Meskipun pada draft awal Rancangan Undang-Undang Pornografi 4 September 2008 perbuatan membuat dan/atau memiliki dan/atau menyimpan pornografi secara pribadi merupakan perbuatan yang dilarang dan

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 185.

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6.



kemudian mendapat penolakan dari sebagian anggota DPR-RI, sehingga terumuskan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan Islam melarang semua perbuatan terkait pornografi karena pornografi merupakan perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan manusia khususnya dalam bidang agama, meskipun ia juga dapat merusak kelima unsur maslahat bagimanusia yakni jiwa, akal, keturunan, harta dan juga termasuk kehormatan diri. Maka dari sini kiranya perlu kajian lebih mendalam terkait Undang-Undang Pornografi khususnya dalam kacamata hukum Islam terutama dalam segi *maqashid syari'ah*. Hingga nantinya dapat dilihat bagaimana peran hukum dalam menangani permasalahan pornografi baik itu dalam kacamata undang-undang maupun hukum Islam berikut juga bagaimana relevansinya khususnya dalam perlindungan anak.

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk menganalisis Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dalam perspektif hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan anak, penulis akan menganalisis filosofi Undang-undang tersebut menggunakan kacamata *maqâsid al-syari'ah*. Untuk membahas hal ini secara rinci maka penulis kemas hal tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH PORNOGRAFI PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

<sup>22</sup> Neng Djubaedah, *Op. cit*, hlm. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka dalam penelitian ini dipandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu batasan istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian. Adapun istilah untuk masing-masing variabel tersebut ialah sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Anak

Kata perlindungan anak merupakan gabungan dari dua variabel kata yakni perlindungan dan anak. Kata perlindungan dalam KBBI diartikan dengan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan kata anak dalam KBBI memiliki beberapa makna diantaranya: 1) generasi kedua atau keturunan pertama (ini juga bisa disematkan pada hewan ataupun tumbuhan); 2) manusia yang masih kecil (belum dewasa); 3) bagian yang lebih kecil pada suatu benda, dll.<sup>23</sup>

Menurut hukum, pengertian anak berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*”. Hal ini serupa dengan pengertian anak yang di kemukakan oleh UNICEF.<sup>24</sup>

Sedangkan arti kata “perlindungan anak menurut” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak-anak mendapatkan haknya untuk tetap hidup.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>24</sup> *Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya, dilengkapi dengan Pro-Kontra*, (Jakarta, Indonesiatera, 2008), hlm . 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun makna perlindungan anak dari segi hukum dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*<sup>25</sup>

#### 2. Pengaruh

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan pengaruh dengan, “Segala daya yang ada atau timbul dari sesuatu (baik itu berupa orang ataupun benda) yang dapat membentuk watak, kepercayaan, dan/atau perbuatan seseorang”. Dan yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini ialah pengaruh buruk akibat pornografi

#### 3. Pornografi

Pornografi berasal dari dua kata yakni kata *porne* yang artinya pelacur dan kata *graphos* yang berarti tulisan atau gambar, kedua bahasa tersebut merupakan bahasa Yunani kuno.<sup>26</sup> Sedangkan secara istilah HB Jassin mendefinisikan pornografi dengan segala bentuk tulisan atau gambar yang dengan sengaja dibuat untuk merangsang nafsu seksual.<sup>27</sup>

Sedangkan KBBI menjelaskan “Pornografi merupakan penggambaran segala laku yang erotis baik itu dilakukan dengan lukisan ataupun tulisan yang

<sup>25</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

<sup>26</sup> Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2004), hlm. 1.

<sup>27</sup> HB Jassin, dalam Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1995), hlm. 109.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>28</sup> Berdasarkan uraian mengenai makna pornografi yang telah dipaparkan oleh KBBI ini, maka titik jelas kekuatan dari pornografi ialah terletak pada kemampuannya dalam membangkitkan nafsu birahi bagi yang menikmati ataupun menatapnya.<sup>29</sup> Sementara itu Ade Armando mengartikan pornografi dengan segala materi yang ada di media yang mengeksploitasi seks dan/atau yang membangkitkan syahwat.

Adapun Jurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan pornografi ataupun tidak berdasarkan penilaian yang berlaku pada kebanyakan masyarakat saat itu.<sup>30</sup> Sedangkan Undang-undang Pornografi mendefenisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam perspektif Islam, kata pornografi dirujuk dengan kata (إباحة) *ibaahiatun* yang berarti “pornografi”, kemudian bisa juga dengan kata (فاحشة) *faahisyun* yang berarti “cabul, dekil, vulgar, porno, keji. Ia juga berarti yang melampaui batas, diluar batas kewajaran, menyolok, dan memalukan”.<sup>32</sup> Pornografi, dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan *fahsyâ* yakni perbuatan

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 889.

<sup>29</sup> Sa’abah, *Loc. cit.*,

<sup>30</sup> Ade Armando, Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum, (Republika online at 23 Mei 2005), lihat Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 299.

<sup>31</sup> UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Lengkap*, cet-14 (Surabaya: Pustaka Progasif, 1997), hlm, 1036.

keji atau perbuatan yang menimbulkan aib besar. Lalu ia juga terkait dengan pembahasan masalah aurat dan tentang pakaian termasuk juga persoalan tampilan (*tabarruj*).<sup>33</sup>

#### 4. Hukum Islam

Dalam permasalahan hukum Islam (*syariat*), hukum adalah *khobar* (Predikat) dari kalimat sempurna, kemudian oleh para *ushully* hukum ini dibahas dan didefenisikan dengan “*Khitabullah* yang bersinggungan dengan perbuatan *mukallaf* terkait dengan tuntutan, pilihan atau ketentuan. *Khitabullah* adalah firman Allah swt.<sup>34</sup> Dan hukum Islam adakalanya berbentuk tuntutan adakalanya juga berbentuk peringatan sebagaimana firman-firman Allah swt yang berhubungan dengan adanya surga dan neraka termasuk juga adanya balasan hari akhir.<sup>35</sup>

Kata hukum Islam merupakan transliterasi dari bahasa Inggris *Islamic Law*, yang dalam Islam dikenal dengan *syariat*.<sup>36</sup>

Sementara itu Zainudin Ali mendefenisikan hukum Islam dengan segala perbuatan *mukallaf* yang berbentuk ketentuan dan harus di didasari dengan sumber hukum Islam itu sendiri yakni Alquran dan Hadist.<sup>37</sup>

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sesuatu yang bersinggungan dengan perbuatan *mukallaf* atau makhluk yang

<sup>33</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39.

<sup>34</sup> Ahmad Takwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, Walisongo Press, Semarang, Juli, 2009, hlm. 4.

<sup>35</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016), hlm. 1.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7. Lihat Raficq S. Abdullah and Nohamed M. Keshavjee, *Understanding Sharia Islamic Law in Globalised World*, (London: L.B. Tauris & Co. Ltd, 2018), introduction, hlm. 13.

<sup>37</sup> Zaenudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2006, hlm. 1-2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa tuntutan, pilihan ataupun ketentuan. Tuntutan sendiri ada kalanya bersifat perintah (untuk mengerjakan) ada kalanya juga berbentuk larangan (untuk mengerjakan) dan ia bersifat paten (harus dikerjakan) dan ada kalanya juga bersifat tidak paten. Dan didasarkan pada pembagiannya para ulama membagi hukum Islam menjadi dua yakni *taklifi* dan *wadh'i*.<sup>38</sup>

## Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari judul yang telah ditetapkan pada penelitian ini, masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema pembahasan ialah:

1. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi.
2. Pornografi dan akibatnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.
3. Penegakan hukum dan keadilan dari kejahatan pornografi.
4. Tinjauan hukum Islam atas perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari ke-4 tema permasalahan yang mungkin dikaji di atas, penulis lebih berfokus pada permasalahan keempat yakni mengenai tinjauan hukum Islam perlindungan anak dari pengaruh pornografi pada Undang-Undang Pornografi.

### 2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak sisi yang bisa dikaji terkait permasalahan mengenai pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008, penulis membatasi

<sup>38</sup> Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Depok: Keira Publishing, 2017), hlm. 67-68. Lihat Anir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tersistematis dan terarah yakni hanya terkait perlindungan anak dari pengaruh pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan pisau analisis teori-teori tentang *maqâsid al-syari'ah*.

### 3. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena di atas pula, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa esensi perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana konsep perlindungan anak yang ditawarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui esensi perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan anak yang ditawarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

#### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam, dan juga sekaligus dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti di bidang hukum, maupun praktisi hukum dan lainnya terutama dalam bidang perlindungan anak, dan juga segala persoalan yang terkait dengan pornografi.
2. Dari segi praktis: Penelitian ini dapat memperkaya kontribusi terhadap literatur pandangan hukum Islam terhadap pornografi, hingga penelitian ini dapat membantu para pembaca yang hendak mengkaji persoalan tersebut terutama dalam perspektif *maqâsid al-syari'ah*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A Pornografi

##### 1. Defenisi Pornografi

###### a. Pornografi secara bahasa dan istilah

Secara etimologi menurut KBBI kata “Pornografi” merupakan kata turunan dari kata dasar “Porno” yang memiliki arti cabul. Sedangkan kata “Pornografi” diartikan dengan penggambaran tingkah laku yang erotis baik itu dilakukan dengan lukisan ataupun tulisan yang digunakan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>1</sup> Berdasarkan uraian mengenai makna pornografi yang telah dipaparkan oleh KBBI ini, maka titik jelas kekuatan dari pornografi ialah terletak pada kemampuannya dalam membangkitkan nafsu birahi bagi yang menikmati ataupun menatapnya.<sup>2</sup>

Bila dirujuk dari asal usul katanya pornografi berasal dari bahasa Yunani yakni kata *porne* dan *graphos*. *Porne* berarti wanita tuna susila (pelacur), secara khusus menunjuk kepada wanita tuna susila kelas terendah dan sangat tidak dihargai di masa itu. Sedangkan *graphos* berarti tulisan, sketsa, atau gambar.<sup>3</sup> Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi pada umumnya adalah perempuan. Namun seiring dengan berjalannya waktu objek

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 889.

<sup>2</sup> Sa’abah, *Loc. cit.*

<sup>3</sup> Sa’abah, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 64. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Pornografi dan Premanisme* (Jilid I; Jakarta: el-Kahfi, 2005), hlm. 5-6.



pornografi meluas dan bisa dikaitkan dengan segala hal yang mengandung kecabulan dan dapat membangkitkan nafsu syahwat.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologis juga terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, Pornografi menurut Ernst dan Seagle sebagai berikut:<sup>5</sup>

*“Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal.”* (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal).

Berdasarkan pengertian di atas maka pornografi disini lebih tertuju pada hal-hal yang bersifat seksual.

Peter Webb mendefinisikan pornografi sebagai suatu yang lebih mengarah kepada kecabulan (obscenity) bukan hanya sekedar sesuatu yang erotis.<sup>6</sup> Adapun Subah Tukan mendefinisikan dengan segala sesuatu yang sengaja dibuat atau dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.<sup>7</sup> Sedangkan Ade Armando mendeskripsikan pornografi lebih kepada sebuah objek yang terdapat di media yang dapat membangkitkan syahwat bagi siapa saja yang melihatnya.<sup>8</sup>

#### **b. Pornografi berdasarkan ketetapan Pemerintah**

Pengertian pornografi yang dirumuskan oleh Undang-undang Pornografi

(UU No 44 Thn 2008) yakni sebagai berikut dijelaskan dalam Pasal 1:

<sup>4</sup> M. Sa'abah, *Perilaku Seks “Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam”* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 64.

<sup>5</sup> Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, Edisi V Januari 2003, hlm. 2.

<sup>6</sup> Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Ibid.*

<sup>7</sup> Sa'abah, *Loc. cit.*

<sup>8</sup> Imade Bandem, *Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi Dalam Seni* (Tanggapan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi), disampaikan dalam Semiloka RUU Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta 27-28 Februari 2006.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;”*<sup>9</sup>

Dari pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 UUP tersebut dapat diketahui bahwasannya pornografi tidak lepas dari tiga hal berikut: *Pertama*, ia merupakan sebuah kecabulan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. *Kedua*, ia berupa benda/tingak (bagi manusia) seperti gambar, video, bahkan juga tingkah laku manusia secara langsung yang mengekspos ketelanjangan dan vulgar. *Ketiga*, ia berhubungan dengan tingkah laku yang merusak bagi mental manusia.<sup>10</sup>

Dari Ketiga pengertian pornografi tersebut sudah terkait dengan pengertian pornoaksi yang kata pertama kali dikemukakan oleh MUI untuk menggambarkan perilaku pornografi yang langsung dilakukan oleh seseorang dimuka umum, Pornoaksi berarti tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi.<sup>11</sup> Pornoaksi menurut MUI adalah sebuah gerakan atau tindakan yang bersifat porno. Hal ini untuk membedakan dengan ungkapan atau gambar-gambar yang bersifat porno.<sup>12</sup> Pornoaksi bermakna segala perbuatan yang mendekati zina masuk dalam kategori pornoaksi,<sup>13</sup> seperti berciuman dimuka umum, berpelukan, berkhawat dengan yang bukan mukhrim, dan segala tingkah laku yang menggambarkan pornografi termasuk tata cara berbusana<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. cit.*

<sup>12</sup> Ahmad Junaidi, *Porno, Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media*, (Gramedia Widiasarana, 2013), hlm. 29.

<sup>13</sup> Pornoaksi berarti tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hlm. 889.

<sup>14</sup> Ahmad Junaidi, *Loc. cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Jurisprudensi (MA RI) Mahkamah Agung Reublik Indonesia: menyatakan sesuatu dikatakan pornografi jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu.<sup>15</sup> Adapun yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi menurut Tjipta Lesmana dan Sumartono dalam sidang Mahkamah Konstitusi terdapat 5 (lima) bidang yaitu; seni, sastra, adat-istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (custom), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang-undang.<sup>16</sup>

### b. Pornografi menurut Islam

Kata pornografi dalam bahasa Arab dirujuk dengan kata (إباحية) *'ibaahiatun* yang berarti “pornografi”, bisa juga dengan kata (فاحش) *faahisyun* yang berarti “cabul, dekil, vulgar, porno, dan/atau keji. Ia juag berarti “yang melampaui batas, diluar batas kewajaran, menyolok, dan memalukan”. Kata فاحش *faahisyun* berasal dari kata (فاحش – يفاحش) *faahasya-yufaahisyu* yang berarti dialog cabul, membicarakan seseorang dengan vulgar, berbicara atau bercanda dengan konten yang tidak pantas.<sup>17</sup> Kata *fahisy* berbentuk jamak *fahsyâ* dalam

<sup>15</sup> Ade Armando, Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum, (Republika online, 23 Mei 2005), lihat Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 299.

<sup>16</sup> Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 383.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Lengkap*, cet-14 (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997), hlm, 1036. Lihat <https://en.wiktionary.org/wiki/B4#Arabic>, lihat <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id>, diakses 01 Agustus 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alquran digunakan untuk menggambarkan perbuatan keji atau perbuatan yang menimbulkan aib besar.<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar susila, seperti bercumbu rayu yang dilakukan oleh seorang istri/suami dengan orang lain yang bukan suami/istri yang sah, tetapi tidak sampai berbuat zina atau melakukan *homoseksual* dengan teman sejenisnya. Keburukan dalam terma *fahisyah* ini merupakan perbuatan yang dilakukan karena kurangnya pengendalian diri. *fahisyah* juga merupakan bentuk tingkah laku yang liar, bodah kebalikan dari prilaku yang santun, dan ia juga berhubungan kendali diri dan akal sehat.<sup>19</sup>

Selain itu, masalah pornografi dalam Islam berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas sebelumnya maka ia tidak lepas dari tiga persoalan, yang pertama berkaitan dengan pembahasan aurat, kedua pembahasan tentang cara pertingakah laku dalam berpenampilan (*tabarruj*), dan yang ketiga berkaitan dengan busana/pakaian. Ketiga Persoalan di atas merupakan pembahasan yang sangat urgent untuk diterapkan dalam keseharian umat Islam, sebab dari ketiga hal di atas lah perbuatan maksiat yang dapat menimbulkan kekacuan dalam keluarga seorang muslim dapat terjadi yakni perzinahan, Zina merupakan dosa besar dan sesuatu yang sangat buruk untuk dilakukan oleh seorang mukmin sebagaimana Allah swt memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga pandangannya hal ini tertera dalam Alquran surat an-nur ayat 30.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Imam Sudarmoko, *Keburukan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal STAIN Ponorogo, 2014). Lihat Ahmad Warson Al-Munawwir, *Loc. cit.*

<sup>19</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat dan Inabah*, Terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 332.

<sup>20</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan *tabarruj* Imam asy-Syaukani berkata: “*at-Tabarruj* adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang ini dapat memancing syahwat (hasrat) laki-laki”.<sup>21</sup> Dari pengertian *tabarruj* yang dikemukakan oleh asy-Syaukani hal ini senada dengan makna dari pornografi itu sendiri yakni segala sesuatu yang bersifat persuasif untuk membangkitkan syahwat sama halnya dengan pornoaksi.

## 2. Ruang Lingkup Pornografi

Untuk mengetahui ruang lingkup pornografi maka kita harus kembali merujuk dari pengertian pornografi itu sendiri, terutama merujuk pada pengertian pornografi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Pornografi pada Pasal 1 yakitu: <sup>22</sup> “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Dari pengertian pornografi tersebut dapat disimpulkan bahwa pornografi itu meliputi dua hal yakni: 1) berupa benda ataupun sebuah tingkah laku yang memuat kecabulan, 2) hal tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian pornografi yang dijelaskan UUP dalam Pasal 1 ayat 1, maka ruang lingkup pornografi dapat diketahui sebagai berikut:

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali asy -Syaukani , *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 395.

<sup>22</sup> Lihat, UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembuatan meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan memproduksi barang yang didalamnya mengandung unsur pornografi.
2. Penggandaan meliputi semua kegiatan yang bertujuan untuk memperbanyak barang pornografi sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 UUP.
3. Penyebarluasan meliputi perbuatan yang bertujuan untuk mengedarkan barang pronografi dengan cara memperdagangkan, mempertontonkan, mempublikasikan, dan/atau menuliskan.

Adapun Mahkamah Konstitusi memutuskan terdapat 5 (lima) bidang yang tidak didapat daikategorikan sebagai pornografi yaitu seni, adat, sastra, hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan/medis, dan olah raga. Selama semua kegiatan atau benda yang dapat dikategorikan sebagai pornografi dilakukan dengan tujuan lima hal diatas maka tidak dapat dikatakan sebagai pornografi sebagai mana yang dimaksud oleh UUP.<sup>23</sup>

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang serta perbuatan tak bertanggung jawab yang lainnya maka pemerintah membuat peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi yakni Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Adapun produk pornografi yang di izinkan untuk dibuat, disebarluaskan dan digunakan ialah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pelayanan kesehatan dan semua hal tersebut hanya

---

<sup>23</sup> Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 383.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.<sup>24</sup> Adapun isi Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014 tentang perizinan tersebut kurang lebih sebagai berikut: “Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi”.

#### a. Norma kesusilaan sebagai batasan pornografi

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan “Sesungguhnya dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu”.<sup>26</sup> Hal ini tentunya berkaitan dengan keberadaan sebuah norma dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat menghormati keberlakuan norma di dalam kehidupan sehari-hari, hukum berkenaan dengan pelanggaran norma sudah diatur jauh hari sebelum lahirnya undang-undang tentang pornografi yakni KUHP Pasal 281 yang mengatur tentang pelanggaran pidana terkait norma kesusilaan.<sup>27</sup>

Norma kesusilaan adalah peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia yang mengatur tentang patut tidaknya perbuatannya

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi Pasal 1 ayat 5.

<sup>25</sup> Pasal 14 UU NO 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>26</sup> Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembina Hukum Nasional, 2010)

<sup>27</sup> Hwian Crhistiano, *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, (Jurnal Hukum, Universitas Surabaya, 2016).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau susila tidaknya perilaku manusia.<sup>28</sup> Untuk mengetahui seberapa jauh perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan hal ini dapat diketahui berdasarkan pengertian norma kesusilaan itu sendiri. Berkaitan dengan pornografi karena di dalam pornografi terdapat unsur kecabulan dan ketidak sopanan yang bertentangan dengan hati nurani manusia secara umum maka hal ini menjadi dasar bahwa pornografi masuk dalam kategori sesuatu yang melanggar norma kesusilaan.<sup>29</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan norma dengan sebuah perangkat dimana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat hingga akhirnya norma tersebut diakui, dihargai, dikenal dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup> Masyarakat Indonesia telah mengadopsi beberapa norma yang telah lama dijunjung tinggi dan di taati dalam kesehariannya sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia akan di kategorikan sebagai sesuatu yang melanggar norma masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Dari uraian mengenai norma yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui ruang lingkup pornografi berkaitan dengan segala sesuatu yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai pornografi. Dalam hal ini sebagai contoh ialah perbuatan zina, mengeksploitasi

<sup>28</sup> Khoiri, Etika Profesi Hukum, (pekanbaru: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 19.

<sup>29</sup> Debra H. Yatim, (2004), "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", *Jurnal Perempuan*, No. 38, 2004, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, hlm. 24.

<sup>30</sup> Khoiri, *Op.cit*, hlm 17. Lihat Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 6-7.

<sup>31</sup> Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembina Hukum Nasional, 2010)



seksual dimuka umum, dan lain-lain. Dan hal ini sejalan dengan keputusan MA yang menyatakan sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai hal itu dikategorikan porno/asusila berdasarkan setandar nilai yang berlaku saat itu.

### 3. Pengaruh Pornografi

Undang-undang Pornografi menjelaskan bahwasannya pornografi semakin berkembang dan mengancam tatanan sosila dalam masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengaruh media komikasi dan terutama internet yang telah menjadi kebutuhan primer kebanyakan masyarakat indonesia dimana berbagai media komikasi tersebut menampilkan atau memberikan konten yang sudah di luar batas kewajaran terkait nilai-nilai serta norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.<sup>32</sup> Pertarungan masyarakat terhadap pornografi mengalami masalah yang sangat berat, di satu sisi masyarakat Indonesia ingin melindungi generasi muda dan anak-anak dari kemerosotan moral, tapi di sisi lain tuntutan *liberalisme* yang dibawa oleh budaya Barat semakin kuat. Tuntutan *liberalisme* membebaskan hak individu, sampai budaya *free sex* menjadi sesuatu yang dianggap biasa.<sup>33</sup> Negara barat berpandangan bahwa sek adalah hak pribadi yang semua orang boleh menikmatinya, dan hal ini bertentangan dengan prinsip dan budaya masyarakat Timur yang lebih konservatif dalam pergaulan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), hlm. 1-2.

<sup>33</sup> M. Yunus Abu Bakar, *Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Jurnal Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, April 2012).

<sup>34</sup> Budi Munawar Racman, *Sekularisme, Libralisme, dan Pluralisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 153.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu alasan mengapa pornografi sangat sulit untuk dibantas ialah karena pornografi saat ini telah menjadi bahan komoditas dalam bidang komersil yang sangat banyak peminatnya di seluruh dunia, bahkan Indonesia mejadi salah satu dari negara pengakses situs porno terbesar di dunia. Menurut survey penikmat pornografi di Indonesia 75% nya ialah remaja dengan rentang usia 15-21 tahun. Remaja pada saat itu begitu akrab dengan internet seolah kehidupan mereka tidak bisa lepas dari internet dan sosial media.<sup>35</sup>

Remaja dalam ilmu psikologi dikenal dengan istilah *pubertiet*, *youth* yang artinya sama dalam bahasa indonesia berarti remaja (anak muda) atau pubertas. Remaja merupakan fase dimana seseorang sedang dalam proses dari anak-anak menuju dewasa hal ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 10 tahun dimulai dari usia 12 sampai 21 tahun. Pengaruh buruk pornografi cepat meluas terutama dikalangan remaja yang sedang berada dimasa pubertas. Hal ini bisa berakibat menimbulkan krisis moral di kalangan remaja, terutama apabila dasar dasar agama kurang sekali dilatihkan sejak kecil. Usaha pornografi juga bisa melemahkan potensi bangsa, akibatnya dapat merusak sendi-sendi falsafah Pancasila.

Pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:<sup>36</sup>

- 1) Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual

Kemampuan remaja yang masih sangat minim dalam menyaring segala informasi mengakibatkan remaja sering terdorong untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan informasi yang mereka terima tanpa memikirkan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang ia lakukan. Sehingga remaja yang saat ini

<sup>35</sup> Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, *Op. cit.*

<sup>36</sup> Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, *Ibid.*

merupakan subjek utama penyebaran pornografi hal ini karena penikmat terbesar pornografi berdasarkan survey ialah para remaja. Akibatnya remaja yang melihat materi pornografi akan terdorong untuk melakukan hal yang ia lihat dalam pornografi tersebut, seperti berbuat zina, perilaku negatif seperti pelecehan seksual dan lain-lain.

## 2) Membentuk sikap atau perilaku negatif

Pengalaman yang remaja dapatkan dari materi pornografi lambat laun akan merusak pola pikir mereka hingga ia akan memandang rendah wanita yang mana wanita kebanyakan merupakan subjek pornografi. Hingga remaja memandang seks bebas merupakan hal yang biasa, dan lebih parahnya menganggap perkosaan sebagai sesuatu yang *permisif* (serba boleh).

## 3) Merusak pola pikir dan kesehatan terutama otak

Belakangan ini banyak penelitian yang dilakukan di berbagai penjuru dunia mengenai dampak bahaya dari pornografi, dan hasilnya sungguh sangat berbahaya. Ahli bedah saraf dari San Antonio, AS yakni Donald Hilton Jr. MD, membeberkan sebagai berikut; *“Sejatinya setiap kecanduan (adiktif) itu berpengaruh terhadap kerusakan otak”*. Misalkan judi, narkoba atau bahkan pornografi. Namun hal yang pasti tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kecanduan pornografi merupakan yang paling parah.” Hal ini bila dibiarkan dapat mengakibatkan penyusutan (pengecilan) otak, dan kerusakan otak tersebut dapat bersifat permanen dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Donald L. Hilton (JR), *He Rertoreth My Soul: Understanding and Breaking the Chemical and Spiritual Chains of Pornography Addiction*, (Forward Press Publishing, 2010), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pornografi juga menyebabkan remaja mengalami krisis dalam pengenalan diri hingga menyebabkan rasa minder dan kehilangan kepercayaan diri.

#### 4) Terjerumus dalam penyakit seperti kelainan seksual

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku menyimpang pada orang lain berada pada kategori “tinggi” dilakukan oleh siswa. Temuan ini didukung oleh pendapat Donald yang mengatakan pornografi dapat menyebabkan seseorang terjerumus kedalam perilaku seks menyimpang seperti, *lesbi*, *homoseks*, *sodomi*, *sadisme* dan *pediphilia*. Semua itu merupakan penyakit kelainan seks dan yang lebih berbahaya ialah para pelaku hal tersebut terancam terkena penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS.

### 4. Undang-Undang Pornografi

#### a. Sosiologis Historis Pembentukan Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk hukum yang proses pembentukannya cukup lama yakni memakan waktu sekitar 10 tahun. Undang-undang pornografi (UUP) dahulunya dinamakan dengan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi (UUAPP) dan dari hasil diskusi dan beberapa pertimbangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi dan disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008.<sup>38</sup>

Dalam pembentukan UUP memang mengalami perdebatan yang sangat panjang hal ini tak lepas status Indonesia sebagai negara yang majemuk, kaya akan budaya agama ras dan suku. Hingga pertentangan akan budaya inilah yang

<sup>38</sup> Firdaus Syam, *Loc.cit.*,



menimbulkan pro dan kontra akan pembentukan UUP. Ada yang berpandangan bahwa UUP merupakan konspirasi dari pihak-pihak tertentu dan hal ini melanggar hak kebebasan berekspresi, dan HAM. Munculnya pemahaman yang demikian membuat pembentukan UUP mengalami kesalahan penafsiran (*distorsi*). Padahal tujuan utama pembentukan UUP ialah untuk menjaga bangsa Indonesia dari kemerosotan moral dan pentingnya penjagaan terhadap generasi muda yang banyak menjadi korban dari dampak buruk pornografi.<sup>39</sup>

Adapun setelah UUP disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 terjadi demonstrasi di berbagai daerah terutama Bali, Papua, Sulawesi Utara. Mereka menolak UUP karena khawatir hal itu akan menghapus budaya/tradisi mereka yang sudah turun-temurun dari nenek moyang hingga saat itu. Contohnya adalah masyarakat Bali punya tradisi bertelanjang dada dan juga saudara kita yang berada di Papua yang terbiasa berbusana seadanya karena memang demikian tradisi mereka.<sup>40</sup> Ada juga dengan sebagian kelompok masyarakat yang juga menolak UUP ialah sebagian Para Seniman, hal ini karena dengan adanya UUP mereka merasa pergerakannya akan terpasung hingga kreativitas seni mereka menjadi terancam.<sup>41</sup>

Terlepas dari berbagai penolakan UUP akhirnya pun tetap di terbitkan karena hal ini sangat bermanfaat bagi bang Indonesia terutama untuk memberantas beberapa tindakan kriminal seperti, kekerasan seksual, dan juga

<sup>39</sup> Jodhi, *UU Pornografi Tidak Akan Rusak Tatanan Budaya*, (Kompas.com, terbitan 13 Maret 2010).

<sup>40</sup> M.detik.com, *Bali Tolak Patuhi UU Pornografi*, (post, Kamis 30 Oktober 2008). Lihat Kompas.com, *Rakyat Bali Tolak UU Pornografi*, (Kamis, 30 Oktober 2008).

<sup>41</sup> Syamsudin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 135.

perbuatan *a moral* lainnya seperti perzinaan, aborsi, pelacuran hingga pembunuhan. Oleh sebab itu meskipun ada penolakan disana sini namun juga banyak yang mendukung pembentukan Undang-Undang Pornografi.<sup>42</sup>

Dari sudut pandang sosial dan budaya sebetulnya UUP merupakan produk hukum yang malah menghormati dan menjaga seni budaya bangsa Indonesia, tentunya hal ini selain UUP juga merupakan produk hukum yang tujuan utamanya melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang banyak menjadi korban pornografi. Hal ini senada dengan ucapan politisi DPR dari fraksi PKS dalam sidang Paripurna DPR RI pembentukan UUP yakni Al Muzammi Yusuf mengatakan: “Penolakan terhadap (RUUP) Rancangan Undang-Undang Pornografi sebenarnya justru memiliki 5 hal kesalahan dalam berfikir: 1) menyalahi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, 2) melupakan amanat dari UUD 1945 yang memerintahkan bangsa Indonesia untuk bertakwa dan berakhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) bentuk peremehan terhadap upaya penyelamatan terhadap generasi muda dan anak-anak sebab fakta mengungkapkan bahwa penyebaran pornografi sangat merugikan para remaja, 4) membuktikan bahwa bangsa kita belum siap untuk berdemorasi, karena tidak menghargai “Panitia Kerja (Panja DPR RI) sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU ini baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima,” bahkan UU No 44 Tahun 2008 telah melalui uji materil oleh sejumlah kalangan, 5) pemikiran masyarakat timur sudah banyak terkontaminasi dengan budaya Barat yang berpaham *liberal*

<sup>42</sup> Firdaus Syam, *Loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan masyarakat Timur merupakan bangsa yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan, norma susila serta agama.<sup>43</sup>

### b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Isi dari Undang-Undang Pornografi antara lain ialah sebagai berikut:

Berkaitan dengan ketentuan umum yakni membahas istilah-istilah yang terdapat dalam undang-undang Pornografi hal ini dijelaskan dalam Pasal 1:<sup>44</sup>

- a) Pornografi adalah segala sesuatu terkait benda ataupun tingkah laku yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi atau pertunjukan langsung dimuka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- b) Jasa Pornografi merupakan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh individu ataupun kelompok melalui berbagai media komunikasi.
- c) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Tujuan pembentukan UUP dijelaskan pada Pasal 3:<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan sebagai berikut untuk menjaga dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika dan berkepribadian luhur, untuk melindungi dan memelihara budaya masyarakat Indonesia dan juga menghormati seni karena Indonesia negara yang majemuk, untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi anak dan perempuan, untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks di Indonesia.

<sup>43</sup> Lihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

<sup>44</sup> Lihat, UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008),

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 3.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal terkait larangan dan pembatasan diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:<sup>46</sup>

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, memperbanyak, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan jasa pornografi.

Peraturan terkait Perlindungan anak diatur pada Pasal 15 dan 16 sebagai berikut:<sup>47</sup>

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Dan terkait kewajiban bagi setiap orang disini berlaku umum untuk siapa saja baik itu perorangan ataupun kelompok maupun organisasi. Dan bila ada seorang anak yang menjadi korban pornografi maka semua yang terkait di atas berkewajiban membimbing dan membina anak hingga pulih baik dari segi fisik maupun mental.

Pencegahan berkembangnya pornografi dilakukan oleh pemerintah dan peraan serta masyarakat diatur dalam Pasal 17-22.<sup>48</sup>

Ketentuan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan dilakukan di pengadilan dengan sistem hukum acara pidana dengan ketentuan yang telah ditetapkan hal ini diatur pada Pasal 23:<sup>49</sup>

Ketentuan tentang Pemusnahan terhadap produk pornografi dilakukan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 28.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal terkait ketentuan Pidana diatur mulai dari Pasal 29 hingga Pasal 40:<sup>51</sup>

### 5. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam sistem hukum Indonesia selain dari hukum Adat dan Barat berlaku juga hukum Islam dalam pengkodifikasiannya. Islam merupakan agama yang mengajarkan setiap muslim untuk menjaga Aqidah dan akhlak hingga persoalan terkait pornografi juga dibahas dalam hukum Islam meskipun ia termasuk dalam masalah kontemporer.<sup>52</sup> Contohnya Islam mengatur tata cara bergaul bagi umat muslim seperti larangan zina, Hal ini diatur dan diperintahkan dalam Quran surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32).”<sup>53</sup>

Islam juga mengatur tatacara berbusana karena pornografi tidak lepas dari hal tersebut sebagaimana diatur dalam Quran surat an-nur ayat 30-31:<sup>54</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْمِرْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>52</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 29.

<sup>53</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004).

<sup>54</sup> Departemen Agama R.I, *ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَوْ ءَابَائِهِمْ أَوْ ءَابَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ  
 أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ  
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ  
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS, An-Nur: 30-31).

Ayat di atas menegaskan bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari Allah swt yang mesti dijaga, maka sang pemilik tubuh yang diamanahi oleh Allah swt wajib



menjaganya dari segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah swt. Hal ini karena keselamatan hidupnya sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>55</sup>

Ajaran Islam jelas melarang/mengharamkan pornografi hal ini karena pornografi memberikan begitu banyak *mudharat* bagi umat manusia. Pornografi dalam Islam dapat di kaitkan dengan perbuatan *fahsyā'*, kata *fahsyā'* yang merupakan bentuk jama' dari kata *faahisyun* yang berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor, cabul atau melampaui batas.<sup>56</sup> Sedangkan secara istilah *fahsyā'* menurut al-Ashfahani, merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah kata *fāḥisyah* atau *fahsyā* menunjukkan makna buruk pada sesuatu bagi siapapun yang mempunyai fitrah dan akal yang waras.<sup>58</sup> Pornografi sudah pasti merupakan suatu perbuatan yang buruk dan bertentangan dengan syariat Islam.

Berkenaan dengan aurat Islam memiliki konsep dan aturan yang jelas hal ini tertera dala Alquran surat an-Nur ayat 31 sebagaimana telah penulis cantumkan sebelumnya.<sup>59</sup> Aurat bagi laki-laki adalah dari pusar sampai lutut sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 321.

<sup>56</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *loc. cit.*

<sup>57</sup> Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, tt, hlm. 626

<sup>58</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat dan Inabah*, Terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 332.

<sup>59</sup> Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila dipandang. Lihat Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihah* (Homes: Al-Irsyad, 1989), h. 345. Dalam al-Qur'an, kata aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal (QS. Al-Ahzab: 13), dua kali dalam bentuk jamak (QS. An-Nur: 31 dan 58). Kata aurat dalam QS. Al-Ahzab: 13 diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam QS. An-Nur: 31 dan 58 diartikan sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan. Lihat al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz XIV, h. 97-98, Juz XII, hlm. 157 dan 201.

angan. Meski masih terdapat perselisihan pendapat antar ulama mengenai hal ini namun kebanyakan ulama berpendapat demikian.<sup>60</sup>

Aurat tersebut meski ditutup sebab bila aurat tersebut tidak ditutup dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang khilaf dan terjerumus kedalam kemaksiatan. Hal ini karena awal mula perbuatan maksiat ialah berawal dari pandangan mata, maka Alquran surat an-Nur ayat 30 memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga pandangan dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan diri kedalam kemaksiatan seperti zina dan lain-lain. Sedangkan perbuatan zina menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1371 H) merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan kekacauan nasab bahkan peperangan antar sesama manusia. Selain itu zina juga perbuatan yang sangat keji dan merendahkan drajat manusia serta dapat menimbulkan penyakit.<sup>61</sup>

#### a. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Pornografi

Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi yakni Fatwa Nomor 27 Tahun 2001 telah lama keluar. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya; sedemakin maraknya pornografi dan

<sup>60</sup> Mengenai batas aurat laki-laki, Ibnu Rusyd dan asy-Syaukani mengatakan bahwa ulama fiqh berbeda dalam tiga pendapat. Pendapat pertama adalah yang dinyatakan oleh Imam asy-Syafii, Malik, dan Abu Hanifah, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Pendapat kedua mengatakan, bahwa aurat laki-laki adalah alat kelamin (*qubul*), sekitar lubang anus (*dubur*), dan paha saja. Pendapat ketiga oleh adh-Dhahiri, Ibnu Jarir, al-Isakhri, salah satu riwayat dari Imam Malik dan Ibnu Hanbal, adalah bahwa aurat laki-laki hanya *qubul* dan *dubur* saja, selebihnya bukan aurat. Semata aurat perempuan dalam perspektif fiqh dibagi dua, aurat perempuan merdeka dan aurat perempuan hamba (*ammah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dengan perempuan amah. Tentang batas aurat perempuan merdeka ada beberapa pendapat, sebagaimana dirangkum asy-Syaukani,” Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Mesir: Musthafa Babi al Halabi li an-Nashr, 1960), Juz I, hlm. 83. Lihat asy-Syaukani, *Nayl al-Authar* (Beirut: Dar al Jil 1973), Juz. II, hlm. 49.

<sup>61</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halbi, 1394 H/1974 M), h. 57. Lihat Syekh Muhammad Al-Gazali, *A Theatic Commentary on The Qur'an*, (Kuala Lumur, Islamic Book Trust, The International Institute Of Islamic Thought, 2000), hlm. 289.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersebar secara luas dan bebas di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan aneka ragam media.<sup>62</sup> Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama degradasi moral di kalangan generasi muda.<sup>63</sup> Misalnya; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual dan seks menyimpang. Selain pertimbangan tersebut, fatwa ini juga didasari kajian mendalam beberapa ayat dalam Alquran dan hadits yang berkaitan dengan larangan pornografi dan pornoaksi, termasuk kaidah fikih, diantaranya yakni surat An-Nur ayat 30-31.<sup>64</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan nomor 287/2001 MUI Komisi Fatwa, menetapkan sebelas keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi.<sup>65</sup>

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dengan atau pakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

<sup>62</sup> Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Suara Muhammadiyah*, (SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah1427 H/2006 M), hlm. 23.

<sup>63</sup> Arief Budiman, *Op. cit.*, hlm. 198.

<sup>64</sup> Departemen Agama R.I, *Op. cit.*

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 295 dan 303-304.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.

Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

### B. Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Anak merupakan generasi penerus bangsa pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan juga termasuk negara. Sebab dalam pertumbuhannya dari anak-anak hingga menjadi dewasa banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangannya seperti kondisi ekonomi, sosial kultur dan lain-lain.<sup>66</sup>

Oleh sebab itu anak memiliki hak perlindungan yang harus mereka terima tanpa terkecuali seperti hak perlindungan dari diskriminasi, kekerasan atau kriminalitas, dan juga hak untuk hidup dan berkembang. Maka hal ini juga termasuk perlindungan dari pornografi dan pornoaksi.<sup>67</sup> Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

<sup>66</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 29.

<sup>67</sup> Angga Astian Putra, *Op. cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengertian Anak Menurut Islam dan Undang-Undang

Secara etimologi kata anak dalam bahasa arab terdapat beberapa sebutan diantaranya **وَلَدٌ**, **فَرْخٌ**, **عَقِبٌ**, **طِفْلٌ** yang memiliki arti sama yakni “anak”. Sedangkan untuk kata “anak-anak” biasanya menggunakan kata **تَسْلٌ** yang juga dapat berarti “keturunan”.<sup>68</sup>

Sedangkan secara terminologi menurut Islam anak adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>69</sup> Kata anak dipakai secara umum. Sedangkan sifat “kecil” dalam pengertian tersebut dihubungkan dengan 2 tingkatan larangan bertindak, pertama kecil dalam arti *mumayyiz* yakni anak belum memiliki kekuatan hukum dalam melakukan segala jenis muamalah dalam artian ia masih membutuhkan wali. Kedua kecil tetapi sudah *mumayyiz* dalam hal ini ia masih dikategorikan anak sudah paham dengan aktivitas muamalah dan sah bila melakukannya.

Dikatakan *mumayyiz* dalam Islam biasanya anak tersebut berusia 7 tahun, maka bila seorang anak belum genap 7 tahun maka ia belum dikatakan *mumayyiz*.<sup>70</sup> Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...<sup>ط</sup>

dan ujilah<sup>71</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

<sup>68</sup> <http://almaany.com/id/dict/ar-id/kamus/>, diakses, 13 Agustus, 2019.

<sup>69</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), nlm. 112.

<sup>70</sup> Korik Agustian, *Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz*, (Artikel, PTA. Jambi).

<sup>71</sup> Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.  
(QS. An-Nisa: 6).<sup>72</sup>

Pengertian anak menurut beberapa ahli diantaranya dikemukakan oleh Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan yang baik untuk perkembangannya.<sup>73</sup>

Adapun KBBI mengartikan anak sebagai generasi kedua dari seseorang, yang lahir melalui proses ovulasi.<sup>74</sup>

Lalu bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia mengenai anak, untuk mengetahui hal tersebut berikut ini definisi anak menurut tata hukum positif di Indonesia;

1. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*". Hal ini sama dengan pengertian anak yang di kemukakan oleh UNICEF.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) di katakan bahwasannya anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan di jeaskan dalam Pasal 1 ayat (20) anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas tahun).

<sup>72</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 179.

<sup>73</sup> H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara. 1991), hlm. 144.

<sup>74</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 72.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
6. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>75</sup>
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
8. Menurut KUHP Pasal 45 anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Demikianlah pandangan hukum positif di Indonesia mengenai pengertian anak, dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, begitu juga UU Tentang HAM, mereka mendefenisikan anak dengan seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun, begitu juga dengan pengertian anak dalam pandangan UU Pornografi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, maksud anak yang tertera dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan ialah seseorang yang masih rentan usia remaja dan juga termasuk dibawahnya. Usia remaja terbagi menjadi 3 fase yaitu masa remaja awal, 12-15 tahun, masa remaja pertengahan, yakni 15-18 tahun, dan masa remaja akhir, 18-21 tahun.<sup>76</sup>

Melihat beberapa peraturan diatas yang menyebutkan anak merupakan seseorang maksimal masih dalam rentan usia remaja, hal ini dapat dipahami karena seseorang yang masih dalam rentan usia tersebut kebanyakan pola

<sup>75</sup> Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya, dilengkapi dengan Pro-Kontra, Yogyakarta, Indonesiatera, 2008), hlm . 9.

<sup>76</sup> <https://id.m.wikipedia.org/remaja>, diakses 01 juli 2019.

berpikirannya belum matang dan masih sangat butuh akan perlindungan dan bimbingan serta pengajaran hingga ia memasuki usia dewasa dan mampu untuk mandiri.

## 2. Hak Anak dalam Ketentuan Perundang-undangan

Sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 telah menetapkan dan mendeklarasikan hak-hak anak secara universal. Adapun hasilnya ialah sebagai berikut.<sup>77</sup>

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang, setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap aspek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

### a. Hak Untuk Memperoleh Perlindungan

Peraturan mengenai perlindungan anak dalam ketentuan hukum positif secara khusus diatur dalam UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki tujuan melindungi anak dari berbagai eksploitasi dan pelanggaran

<sup>77</sup> Gana Radguna, *Hukum Kebiri dalam UU NO.17 Tahun 2016*, (Uin Suska, Jurnal Hukum Islam, 2017), hlm. 69-70.

hak lainnya. Terdapat 4 prinsip dasar hak yang melekat pada diri setiap anak hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak sebagai berikut.<sup>78</sup>

### 1. Non Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perbuatan yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain dalam artian lebih mengistimewakan yang satu dengan yang lain. Prilaku diskriminasi sangat dikecam diseluruh penjuru dunia karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak menghargai serta menghormati manusia. Anak berhak atas hak non diskriminasi atas apapun baik dari ras, suku, dan segala hal terkait diskriminasi hal ini termasuk dalam pendidikan, politik dan lain-lain.<sup>79</sup>

### 2. Memperoleh kepentingan terbaik bagi anak

Hak untuk memperoleh kepentingan terbaik bagi anak (*legal principle of the best for the child*) ini berkaitan dengan memperlakukan anak dengan baik seperti anak merupakan prioritas utama dalam segala hal. Negara dan Pemerintah serta seluruh badan hukum baik yang bersifat publik maupun privat berkewajiban melindungi hak anak ini.<sup>80</sup> Hal ini termasuk setiap ketetapan pemerintah dalam menyusun setiap Perppu ataupun dalam pembuatan perundang-undangan harus mengutamakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak-anak

<sup>78</sup> Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang baik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

<sup>79</sup> Loisa Magdalene Ghandi Lapian, Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 2.

<sup>80</sup> Loisa Magdalene Ghandi Lapian, Hetty A. Geru, *Ibid*, hlm. 58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hak hidup dan berkembang

Setiap orang berhak atas hidup dan berkembang sebagaimana dijelaskan pada dalam UU HAM yakni UU NO 39 tahun 1999 dan ia merupakan hak utama untuk setiap orang.<sup>81</sup>

### 4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak dapat membentuk dan mengemukakan pendapatnya secara bebas berdasarkan hak kebebasan dalam berekspresi. Hal ini terkait prinsip adopsi anak bebas mengutarakan pendapatnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.<sup>82</sup>

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi atas hak-haknya. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002, yaitu sebagai berikut :

1. Hak anak atas hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2002).
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2002).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi (Pasal 6 UU No. 23 tahun 2002).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU No.23 tahun 2002).
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002).
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).

<sup>81</sup> Zainul Muttaqin, *Loc. cit.*

<sup>82</sup> Loisa Magdalene Ghandi Lopian, Hetty A. Geru, *Loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002).
12. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10 UU No. 23 tahun 2002).
13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002).

### 3. Perlindungan Anak dalam Islam

Anak merupakan karunia dari Allah swt, yang diamanahkan untuk dijaga dan dipelihara dan dirawat dengan baik hingga ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Sehingga anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang menyebabkan kesengsaraan bagi orang tua begitu juga sebaliknya sebagaimana Allah swt berfirman:<sup>83</sup>

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

<sup>83</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Translit Azwir Butun, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm. 53.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:233).”

Islam sebagai agama yang rahmah ia memberikan perlindungan kepada manusia bahkan ketika ia masih dalam keadaan janin. Setiap manusia berhak atas pertumbuhan dalam hidupnya maka semenjak manusia masih dalam kandungan Islam telah mengatur hak-hak yang wajib dipenuhi oleh rang tua terhadap anaknya hingga ia dilahirkan dan bahkan sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mampu mandiri Islam mengatur semuanya.<sup>84</sup>

Istilah perlindungan anak tidak ditemukan dalam literatur Islam klasik (*fiqh*), yang ada adalah istilah yang semakna dengan makna perlindungan anak. istilah tersebut adalah *ḥâḍanah*.<sup>85</sup>

*Hâḍanah* secara bahasa berarti memelihara dan mendidik anak. kata ini berasal dari kata *al-hidn* yang berarti *al-janb* yang berarti lambung atau rusuk, hal ini karena seorang ibu sering merangkul anaknya dibawah rusuknya atau pangkuannya.<sup>86</sup> Sedangkan secara istilah *ḥâḍanah* ialah pemeliharaan anak kecil oleh orang tua atau walinya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri berupa pemenuhan atas nafkah guna kesejahteraan hidup anak tersebut.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, 2018), hlm. 39.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:PrenadaMedia,2003), hlm. 175.

<sup>87</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Adits, TanpaTahun), J. IV, hlm. 582.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *ḥâdanah* dengan *kafālah*.<sup>88</sup> Secara bahasa *ḥâdanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi (w. 450 H) membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*ḥâdanah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *ḥâdanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.<sup>89</sup>

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *ḥâdanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili (w. 1437 H) bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab*

<sup>88</sup> al-Syaukāni, *Nail al-Authār, Syarh Muntaqā al-Akhbār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 7, hlm. 128-132.

<sup>89</sup> Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz. 15, hlm. 100.

identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *ḥâḍanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *ḥâḍanah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *ḥâḍanah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.<sup>90</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwanya perlindungan anak dalam Islam merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak guna melindunginya dari bahaya dahi kemaslahatan anak itu sendiri.<sup>91</sup>

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemeliharaan anak atau *ḥâḍanah* diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 1 poin (g) “Pemeliharaan atau *ḥâḍanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.<sup>92</sup> Dalam KHI juga dijelaskan batasan umur untuk seorang anak dianggap dewasa dalam BAB XIV tentang pemeliharaan anak

<sup>90</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), J. I, hlm. 7327.

<sup>91</sup> H.M. Arifin, *Loc. cit.*

<sup>92</sup> Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasal 98 ayat 1 “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>93</sup>

## Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam, Syariat, Fikih, dan *Qânûn*

#### a. Hukum Islam

Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Melainkan dalam Alquran terdapat kata *syariah*, *fiqh* dan juga *qanun*. Hukum Islam merupakan translitrasi dari bahasa Inggris *Islamic Law* yang dibahasa Indonesiakan menjadi hukum Islam.<sup>94</sup>

Bila dilihat dari susunan katanya hukum Islam terbentuk dari dua kata yakni hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hakama yahkumu hukman* yang berarti “kebijaksanaan”. Hal ini mempunyai maksud agar seseorang yang paham hukum ia adalah orang yang bijaksana.<sup>95</sup> Hukum juga dapat diartikan dengan *qadha’* yang berarti putusan.<sup>96</sup> Hal ini juga terkait dengan makna hukum sebagai sesuatu yang bijaksana karena putusan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seorang Hakim dan harus adil dan bijaksana. Muhammad Daud Ali juga

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7. Lihat Raficq S. Abdullah and Nohamed M. Keshavjee, *Understanding Sharia Islamic Law in Globalised World*, (London: L.B. Tauris & Co. Ltd, 2018), introduction, hlm. 13. Lihat Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>96</sup> Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 25.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan makna hukum yang berasal dari bahasa arab tersebut juga dapat diartikan dengan norma, kaidah, pedoman, ataupun tolak ukur.<sup>97</sup>

Sedangkan dalam kamus *Oxford* kata hukum diartikan dengan sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>98</sup>

Sedangkan kata Islam berasal juga berasal dari bahasa Arab “*aslama yuslimu islaman*” yang memiliki arti damai, selamat.<sup>99</sup>

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Ali Imran ayat 20 :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

“20. kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi<sup>100</sup>: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Sedangkan secara terminologi hukum Islam didefenisikan oleh para Ushully “*Khithab* (Firman) Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan

<sup>97</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016), hlm. 1.

<sup>98</sup> Rohidin, *Ibid*, hlm. 2.

<sup>99</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 654.

<sup>100</sup> Ummi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan Ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi Al Kitab.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berupa perintah dan larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan *mukallaf* dalam bentuk penetapan.<sup>101</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sesuatu yang bersinggungan dengan perbuatan *mukallaf* atau makhluk yang berupa tuntutan, pilihan ataupun ketentuan. Tuntutan sendiri ada kalanya bersifat perintah (untuk mengerjakan) ada kalanya juga berbentuk larangan (untuk mengerjakan) dan ia bersifat paten (harus dikerjakan) dan ada kalanya juga bersifat tidak paten. Dan didasarkan pada pembagiannya para ulama membagi hukum Islam menjadi dua yakni *taklifi* dan *wadh'i*.<sup>102</sup>

#### b. Syariat

Syariat secara bahasa berarti “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun.”<sup>103</sup> Hal ini kemudian oleh orang arab di kata syariat juga dapat diartikan dengan *tariqah mustaqimah* yang berarti jalan yang lurus yang diikuti oleh umat muslim.<sup>104</sup>

Sedangkan Muhmud Syaltut mendefinisikan syariat dengan “tempat yang didatangi oleh manusia dan hewan guna meminum air. Sedangkan menurut istilah

<sup>101</sup> Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Op.cit*, hlm. 26.

<sup>102</sup> Ali Jum’ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Depok: Keira Publishing, 2017), hlm. 67-68. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

<sup>103</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.

<sup>104</sup> Manna’ Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat merupakan hukum-hukum dan tata aturan yang Allah swt syariatkan buat hamba-Nya untuk di ikuti.<sup>105</sup>

Sedangkan secara terminologis syariat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna al-Qhaththan, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.<sup>106</sup>

Para ulama mendefenisikan syariat sebagaimana dikutip oleh Hanafi (1970) dalam bukunya *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* sebagai berikut:

“Syariat adalah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, saw, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai *hukum- hukum cabang dan amalan*, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqâd*), yaitu yang disebut *hukum-hukum pokok* dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat (*syarâ'*) disebut juga agama, *ad-dîn* dan *al-millah*).<sup>107</sup>

Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian,yaitu berikut ini.<sup>108</sup>

1. Syariah dalam hukum Islam yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
2. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan masa.
3. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbat* dari Alquran dan Al-Hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi,

<sup>105</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 18.

<sup>106</sup> Manna' Khallil al-Qhattan, *Loc. cit.*

<sup>107</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 9.

<sup>108</sup> Zaenudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2006, hlm. 3-4.



hasil *Ijtihad* dari para *mujtahid*, dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *ijtihad* lainnya.<sup>109</sup>

### c. Fikih

Fikih menurut Salman Madkur, “Fikih maksudnya ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapinya dengan sempurna. Kata fikih ini juga merupakan kata yang digunakan untuk hukum-hukum keagamaan baik yang berhubungan dengan aqidah maupun amaliah. Dan segala sumber fikih diperoleh dari *ijtihad* dari sumber-sumber hukum Islam yakni wahyu dan akal.”<sup>110</sup>

Hukum yang terdapat dalam Alquran masih bersifat umum belum terperinci, hingga norma hukum dasar yang bersifat umum dalam Alquran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah *ilm al-fiqh*, yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ilmu hukum (fikih) Islam. Sebagaimana dilansir oleh Muhammad Daud Ali (w. 1998) dalam Hukum Islam, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *baligh* (dewasa).<sup>111</sup>

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>110</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Op.cit.* hlm. 20.

<sup>111</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Oktober, 2001, hlm. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara ringkas fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.<sup>112</sup> Adapun perbedaan antara fikih dengan syariat dapat dilihat dilihat dibawah ini.<sup>113</sup>

1. Syariah terdapat dalam Alquran (Wahyu Allah) dan Al-Hadis (Sunnah Rasul). Fikih terdapat dalam Kitab Fikih, yaitu pemahaman manusia yang mempunyai syarat tentang syariah dan hasil pemahaman itu.
2. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup lebih luas karena di dalamnya, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan ahlak. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang bersifat perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
4. Syariah hanya satu. Fikih lebih dari satu seperti terlihat aliran-aliran hukum yang disebut mazhab dan mazhab-mazhab itu.
5. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keberagaman.

Abu Hanifah (w. 767) mendefinisikan, fikih adalah pengetahuan tentang manusia apa yang wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Menurut Imam Syafi'i (w. 820), fikih adalah ilmu tentang hukum syariah dengan sifat perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian ilmu dalam konteks ini adalah penemuan yang mutlak yang diperoleh dari keyakinan dan dugaan karena sesungguhnya hukum amaliyah telah ditetapkan dengan dalil yang *qat'i* dan yakin seperti apa yang telah ditetapkan pada umumnya dengan dalil *dzani*.<sup>114</sup>

#### d. *Qânûn*

Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi *qânûn* sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-

<sup>112</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7-9.

<sup>113</sup> Muhammad Ali Daud, *Op.cit*, hlm 45-46.

<sup>114</sup> Sumber, Mu'inudinillah, 20 Maret 2015.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata *qânûn* disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar *qânûn* adalah *ra'yu* (produk manusia). *Qânûn* (undang-undang) merupakan sekumpulan aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti KUHP dan lain-lain.<sup>115</sup> *Qânûn* bisa juga digunakan sebagai hukum yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia.

Perbedaan antara syariat dan *qanun* ialah sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Dalam segi pembuatan, *qanun* merupakan produk manusia, sedangkan syariat merupakan *Khithabullah*.
2. Syariat merupakan hukum yang sempurna dan berlaku sepanjang zaman sedangkan *qanun* tidak.<sup>117</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan antara wilayah huku privat dengan hukum publik sebagaimana hukum barat berlaku. Hal ini karena dalam wilayah hukum publik dalam Islam juga terdapat persoalan hukum privat di dalamnya demikian juga sebaliknya.

<sup>115</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

<sup>116</sup> Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30.

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Op. cit*, hlm. 34.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup hukum Islam dalam fikih terbagi menjadi dua yakni ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan sedangkan muamalah hubungan antar sesama manusia, meskipun di dalam muamalah tak lepas dari hukum Allah swt. Muamalah terbagi dalam beberapa bidang diantaranya: *munakahat*, *wirâtsah*, *mu'âmalat* dalam arti khusus, *jinâyah* atau *uqûbat*, *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah), *siyâr*, dan *mukhâsamat*.<sup>118</sup>

Apabila Hukum Islam disistematiskan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:<sup>119</sup>

#### 1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- c. *Mu'âmalat* hal ini berkaitan dengan ekonomi syariat seperti hak milik, akad, transaksi dan lain-lain.

#### 2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yakni aturan hukum yang memuat hukum pidana Islam seperti *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Alquran dan Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran).

<sup>118</sup> M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.

<sup>119</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

### 3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati/diperselisihkan. Yang disepakati antara lain Alquran dan Sunnah serta Ijma' dan Qiyas. Adapun yang diperselisihkan antara lain istihsan, urf, masalah mursal, sadduzhari'ah, dan istishab.<sup>120</sup> Hal ini didasarkan pada Alquran Surat An-Nisa': 59.<sup>121</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Alquran, An-nisa': 59).

Dari ayat diatas jelas bahwasannya sumber hukum Islam dapat terbagi menjadi 2 bagian yakni sesuatu yang dikembalikan kepada agama yakni Alquran dan Sunnah, kemudian hal yang berkaitan dengan fikih yakni Ijma' dan Qiyas.

<sup>120</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Op.cit.* hlm. 27.

<sup>121</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ctk. Ke-10, CV Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini maka dapat dikelompokkan bahwa sumber hukum Islam terbagi menjadi *naqli* (wahyu) dan *aqli* (akal manusia).<sup>122</sup>

#### 1. Alquran

Ada dua sifat yang dianut Alquran dalam masalah hukum. Pertama, hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa serta bagi seluruh umat. Terhadap hukum yang bersifat tetapi ini, Alquran menyebutnya secara rinci. Kedua, hukum yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum. pedoman ini berasaskan keadilan, persamaan, kebersamaan, musyawarah, perdamaian, pengakuan hak individu, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial, menyampaikan amanah serta tidak memberatkan.<sup>123</sup>

Dari sifat kedua yang dianut Alquran memberi petunjuk *syariah* ditetapkan bukan untuk membebani pelaksanaan hukum (*mukalaf*), tetapi guna memberi kemaslahatan bagi manusia sendiri. Tujuannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehidupan sejahtera bagi manusia yang mengarah pada kebaikan perorangan dan masyarakat.<sup>124</sup>

#### 2. Sunnah

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy memilih pendapat Ahli *Ushul* yang memformulasikan hadits dengan: “perbuatan, ucapan dan *taqrir* (persetujuan/keputusan) nabi yang berhubungan dengan hukum. Antara hadis dan sunnah mengandung makna yang sama, yakni sama-sama semua perbuatan, ucapan dan *taqrir* Nabi. Perbedaananya, hadis adalah semua peristiwa yang

<sup>122</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, ctk Pertama, Jakarta, Mei, 1995, hlm. 3.

<sup>123</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasanya*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997), hlm. 105

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disandarkan kepada Nabi walaupun hanya sekali saja terjadi selama hayatnya. Sunnah adalah amaliah Nabi yang mutawatir, khususnya dari segi maknanya.<sup>125</sup>

Menurut Hasbi, Rasulullah saw di samping berfungsi sebagai rasul Allah swt, juga sebagai manusia biasa. Ucapan atau perbuatan Rasulullah saw dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syariah yang harus ditaati. Hanya ucapan, perbuatan dan *taqririnya* dalam kualitasnya sebagai Rasul yang memang berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syariah yang wajib diikuti.<sup>126</sup>

Sunah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah saw yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasyri'*. Berdasarkan pengertian sunnah tersebut, sunnah terbagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:

1. Sunnah *qauliyah*

Sunah *qauliyah* merupakan sunah yang berupa perkataan nabi saw. Contoh Sunnah *Qauliyah* misalnya, hadis yang menyatakan bahwa amal kebaikan itu hendaklah didahului dengan niat dan seseorang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya.

2. Sunah *fi'liyah*

*Fi'liyah* (berupa perbuatan), contohnya ialah tata cara sholat, berwudhu, dan lain-lain.

3. Sunah *taqririyah*

*Taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan orang lain).

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* secara etimologi berarti *al-ittifaq* yang berarti kesepakatan, dikatakan sepakat bila suatu kelompok bersepakat atas sesuatu.<sup>127</sup>

Sedangkan secara terminologi menurut ulama ushul *Ijma'* adalah kesepakatan ulama zaman dari umat nabi Muhammad saw dalam permasalahan agama secara mutlak.<sup>128</sup>

Kesepakatan disini merupakan kesepakatan otoritatis (*ahl al-hall wa al-aql*), mereka adalah mujtahid Umat, bukan semua orang alim. Disamping itu, kesepakatan tersebut hanya pada kasus-kasus kontemporer dari perkara-perkara syara', serta terjadi pada tiap zaman pasca wafatnya Rasulullah saw.<sup>129</sup>

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa *ijma'* dapat dijadikan sebagai hujjah bila: 1) kesepakatan ulama terjadi pada satu era pasca wafatnya Nabi saw, 2) semua mujtahid bersepakat pada hukum syar'i pada suatu peristiwa pada waktu terjadinya. 3) kesepakatan diambil berdasarkan keterangan para mujtahid dengan jelas berdasarkan syara', 4) kesepakatan datang dari seluruh mujtahid.<sup>130</sup>

### 4. *Qiyas* dan *Ra'yu*

*Qiyas* menduduki peringkat keempat dalam sumber hukum Islam. Maknanya adalah, *qiyas* baru digunakan apabila dalam Alquran, hadits dan *Ijma'* tidak ditemukan. *Qiyas* tidak dapat dijadikan *hujjah syariah* dalam masalah ibadah badaniah, apalagi masalah haram dan halal. Menurut Hasbi, makna *Ra'yu* pada masa sahabat ialah: "pilihan hati karena dirasa benar, setelah direnungkan

<sup>127</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Op.cit*, hlm. 281.

<sup>128</sup> Nourouzzaman Shiddiq, *Op.cit.*, hlm. 119.

<sup>129</sup> Sulaeman Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 42-44.

<sup>130</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Op.cit*, hlm. 282



dan dipikirkan serta dicari mana yang benar terhadap hal yang betentangan dalilnya atau tidak diperoleh *nash* baginya”.<sup>131</sup> Menurut Hasbi, *qiyas* yang berlandaskan *maslhahat mursalah* seperti konsep Malik pada asalnya sama maknanya dengan *ra’yu* yang berlandaskan *istihsan* (kebaikan berasaskan keadilan) seperti konsep Abu Hanifah.

*Qiyas* artinya menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan benda lain yang menyamainya, misalnya mengukur baju dengan meteran. Artinya mengukur bagian-bagiannya dengan meteran. Juga dikatakan *Qiyas* ialah menyamakan karena mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, berarti menyamakan di antara dua benda tersebut.<sup>132</sup> *Qiyas* menurut Ulama *Ushul* ialah menghubungkan sesuatu kejadian yang tidak ada *nash*nya kepada kejadian lain yang ada *nash*nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>133</sup> Menurut ulama *Ushul*, *qiyas* adalah mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh *nash* dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh *nash* bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan *nash*.

Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa semua hukum syara’ untuk mewujudkan *kemshlahatan*/kepentingan manusia, bukan tanpa tujuan. Akan tetapi apabila hukum-hukum yang dibawa *nash* termasuk tujuannya dan *illat* yang melandasinya, subjek hukum (mukalaf) wajib melaksanakan/memperlakukannya pada semua peristiwa hukum yang dicakup oleh *nash* itu dan para *mujtahid* berkewajiban mengetahui maslahat yang menjadi tujuan syara’ menetapkan

<sup>131</sup> Nourouzzaman Shiddiq, *op.cit.*, hlm. 121.

<sup>132</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 75

<sup>133</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 75



serta mengetahui *illat* yang jelas yang dijadikan *syara'* sebagai hubungan hukum, karena di dalam hubungan itulah terwujud *kemashlahatan*.<sup>134</sup>

#### 5. *Urf* (adat/kebiasaan)

Adat kebiasaan ("*urf*") yang dijadikan sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan yang terdapat di Arab. Adat istiadat di luar Arab yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh manusia yang sejahtera, dapat dijadikan landasan hukum.<sup>135</sup> Syaria Islam mengakui *urf* sebagai sumber hukum menurut Hasbi karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Hasbi memberikan contoh Rasulullah saw membiarkan Al-Abbas ibn Abdul Muthalib menerima laba dari modal yang diputar oleh orang lain karena hak itu sudah menjadi *urf* bagi masyarakat Mekah. *Urf* yang dijadikan sumber hukum adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan aqidah, tauhid, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. *Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>136</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Islam (*Maqâsid al-Syari'ah*)

##### a. Defenisi *Maqâsid al-Syari'ah*

Alquran selaku sumber ajaran Islam merupakan aturan hukum yang belum terperinci hingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dari hadist serta sumber hukum

<sup>134</sup> Sulaeman Abdullah, *op.cit.*, hlm. 82-83.

<sup>135</sup> Nourouzzaman Shiddiq, *op.cit.*, hlm. 122.

<sup>136</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 130

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang lain.<sup>137</sup> Dari sumber hukum Islam tersebutlah hukum Islam berkembang dan dapat dikaji *maqasid syari'ah*-nya hingga ia tak lekang oleh waktu dan tempat.

Secara bahasa *maqâsid* berasal dari gabungan (*idhafah*) kata majemuk antara *maqâsid* dan *syari'ah*:

المقاصد لغة: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد " يقال: قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصَدًا، فالقصدُ والمقصدُ بمعنى واحد. والقصدُ يأتي في اللغة لمعان، المعنى الأول: الاعتماد، والأَمُّ، وإتيان الشيء، والتوجه.<sup>138</sup>

*Maqâsid* secara bahasa adalah jamak dari *maqâsad*, dan *maqâsad* mashdar *mimi* dari *fi'il qaşada*, dapat dikatakan: *qaşada-yaqşidu-qaşdan-wamaqşadan*, *al-qaşdu* dan *al-maqşadu* artinya sama. Beberapa arti *al-qaşdu* adalah: *ali'timad*: berpegang teguh, *al-amma*: condong, mendatangi sesuatu atau menuju.

Sedangkan kata *syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a*, *yasra'u*, *syar'an* yang artinya membuat *syari'at* atau perundang-undangan, menerangkan serta menyatakan.<sup>139</sup>

Sedangkan menurut istilah pengertian *maqâsid al-syari'ah* dikemukakan oleh para ulama dalam literatur mereka diantaranya adalah :

<sup>137</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7.

<sup>138</sup> Lihat *Qamus Al Muhith* 2/327, *Mu'jam Maqayis Al Lughaat* 5/95, *Al Mishbah al Munir* 2/692, *Muhtarus sihhah* hlm.. 536, *Tahdziib Asmaa Al Lughaat* 2/92

<sup>139</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H)

Menegaskan bahwa *maqashid syariah* itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>140</sup>

2. Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur (w. 1393 H)

Beliau berpendapat bahwa *maqâsid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqâsid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqashid* umum dan *maqashid* khusus. *Maqâsid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.<sup>141</sup>

3. Abu Ishaq al-Syathibi (w. 590 H)

Beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqâsid al-syari'ah* disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.<sup>142</sup>

4. Wahbah Mustafa al-Zuhaily (w. 1436 H)

Menyebutkan *maqâsid al-syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus

<sup>140</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996 jilid 3), hlm. 37.

<sup>141</sup> Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Zafâ'is, 2001), hlm. 190-194.

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm. 4.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).<sup>143</sup>

Sedangkan menurut Satria Effendi M. Zein, *maqâsid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>144</sup> Al-Syatibi (w. 590 H) melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>145</sup>

#### b. Metode Penetapan *Maqâsid al-Syari'ah*

Ibnu Asyûr (w. 1393 H) berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui tiga cara penetapan yaitu:<sup>146</sup>

*Pertama*, penelusuran (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum syari'at yang telah diketahui *'illat*-nya secara tekstual, atau melalui penggalian *'illat* melalui penalaran.

*Kedua*, dalil-dalil Alquran yang lugas sisi penunjukan tekstualnya dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyari'atan sebuah kasus hukum.

Imam al-Syathibi (w. 590 H), mendeskripsikan ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari syari'at (*maqâsid al-syari'ah*)

<sup>143</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998., juz II), hlm. 1045.

<sup>144</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

<sup>145</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Op. cit.*, hlm. 195.

<sup>146</sup> Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Op. cit.*, hlm. 190-194.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, bahwa *maqâsid al-syari'ah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *naş sharih* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *zahir*-nya saja. Ini adalah metode Madzhab *Zahiriyah* yang hanya memandang makna *zahir* dari *naş* untuk menentukan *maqâsid al-syari'ah*.

Kedua: klaim bahwa *maqâsid al-syari'ah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *naş*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syari'at, hingga tak tersisa sedikitpun sisi *zahir* dari *naş* yang dapat dijadikan pegangan.

Ketiga, *maqâsid al-syari'ah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *zahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyari'atan sebuah hukum tanpa bertentangan dengan sisi *zahir naş*. Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh para panyoritas ulama'.<sup>147</sup> Karenanya, Asy-Syathibi (w. 590 H) memberikan kesimpulan bahwa *maqâsid al-syari'ah* bisa diketahui dengan tiga cara yaitu:<sup>148</sup>

Pertama, cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.

Kedua; dengan memandang 'illat-'illat dari perintah atau larangan, seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.

<sup>147</sup> Muhammad Aziz dan Sholikhah, *Metode Penetapan Maqasid al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, (Jurnal Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ntt).

<sup>148</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmy As Syatiby, *Kitab Al Muwafaqoot*, (Dar Ibn Qayyim, 2003M/1424H)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, bahwa dalam penerapan hukum syar'i, Syari' memiliki tujuan pokok (*maqâşid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqâşid tabi'ah*), adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqla'*) terhadap *nash*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *maqâşid* yang tidak tertera dalam *nash* namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *maqâşid al-syari'ah*.

#### c. Pembagian *Maqâşid al-Syari'ah*

Bila dicermati semua perintah dan larangan Allah swt, baik dalam Alquran maupun hadist yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam) akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat *al-Anbiya'*:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. *Al-Anbiya'*: 107).”<sup>149</sup>

Penghapusan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwasannya memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.<sup>150</sup>

*Maqâşid al-syari'ah* berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua, yakni; 1) *maqâşid syar'i* dan 2) *maqâşid mukallaf*.

<sup>149</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004), hlm. 461.

<sup>150</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 206.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. *Maqâsid Syari'*

Yaitu *maqâsid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum.

Tujuannya adalah ( *jalbil masholih wa daf'il mafasid*) menarik kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat. Menurut as-Syathibi, kemaslahatan terbagi empat bagian,<sup>151</sup> Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi (w. 590 H) dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqâsid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqâsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqâsid al-syari'ah* dalam arti *maqâsid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Pada pandangan As-Syatibi, Allah swt menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqasidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan (*maṣlahah*) kepada mereka dan menolak keburukan (*mafsadah*) yang menimpa mereka. Menurutnnya segala apa yang disyariatkan tidak terlepas dari *maqasid al-syariah*. Tujuan syariat dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *Dharuriyyat*, *Tahsiniyyat*, dan *Hajjiyyat*<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 5.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 15.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Kepentingan Asas (*al-Dharuriyyat*)

Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akherat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi. Sehingga dalam syariat dikenal dengan *al-daruriyyat al-khamsah* ( lima hal yang sangat penting ) diantaranya adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima hal diatas merupakan masalah yang senantiasa di jaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, sehingga yang di gulirkan oleh syariat meletakkan dua sendi dasar yaitu:

Mewujudkan dan melahirkan hukum (*al-ijad* ) dan Menjaga kesinambungannya (*al-hifd* ).<sup>154</sup>

#### 1) Agama ( الدين )

Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, *syahadat* dengan segala konsekwensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, *hisab* dan lain-lain. Dasar-dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar.<sup>155</sup>

#### 2) Jiwa ( النفس )

Syari'at mewujudkannya dengan menikah, karenanya akan menyehatkan jiwa, memperbanyak keturunan dan generasi penerus.

<sup>154</sup> Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz Fi Ushulil Fiqh*, (, Beirut, Muasasah Ar Risaalah 1427H/2006) cet ke-15.

<sup>155</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, syariat mewajibkan menjaga jiwa dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Begitupula ketika Allah swt mensyariatkan qishah yang tujuannya untuk menjaga jiwa manusia.<sup>156</sup>

#### 3) Akal ( العقل )

Merupakan karunia Allah yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba, khamar dan segala hal yang dapat memabukkan atau menyebabkan candu (*addiction*).<sup>157</sup>

#### 4) Keturunan ( النسب )

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjeerumuskan ke zina. Begitupula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.<sup>158</sup>

#### 5) Harta ( المال )

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan syariat. Syariat juga mewajibkan setiap orang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, menjaga harta mereka dan juga mengharamkan mencuri, dan segala hal yang dapat merugikan orang lain serta menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggungjawab atas harta tersebut.

<sup>156</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 92.

<sup>157</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Kiat Membersihkan Hati dari Kotoran dan Maksiat*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 43.

<sup>158</sup> Sapiudin Shidiq, *Loc. cit.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Kebutuhan Biasa (*al-Hajiyyat*)

Ia merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah: Syari'at membolehkan *rukhsah* dalam ibadah untuk memudahkan bila terjadi kesulitan dalam melaksanakan perintah dengan tanpa disengaja.<sup>159</sup>

#### c. Keperluan Mewah (*al-Tahsiniyyat*)

Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan nyaman hidup. “Seperti: Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah nafilah, shadaqah, shalat sunnah dan lain-lain. Dalam muamalah, dilarang boros (*israf*), jual beli diatas pembelian orang lain dan lain-lain. Dan dalam ‘adat, diajarkan cara makan dan minum yang baik.”<sup>160</sup>

#### 2. *Maqâşid al-Mukallaf*

Merupakan tujuan syariat bagi *mukallaf* dalam melakukan suatu perbuatan. *Maqasid mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. kaidah berperan dalam *maqâşid mukallaf* adalah: “*Maqâşid mukallaf* hendaklah selaras dengan *maqâşid al-syari'ah* itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat”.<sup>161</sup>

<sup>159</sup> Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hlm. 235.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: CV. Budi Urama, 2018), hlm. 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tinjauan Pustaka yang Relevan

Dalam penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu terdapat beberapa pembahasan yang relevan dengan penelitian ini, hanya saja subjek ataupun fokus penelitian dari pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian tersebut diantaranya ialah sebagai berikut :

#### 1. Mufti Khakim<sup>162</sup>

Jurnal ini di angkat dari sebuah tesis yang berjudul, “Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana”. Dalam abstrak saudara Mufti Khakim memaparkan kemajuan teknologi memiliki kontribusi besar dalam penyebaran pornografi, bahkan hal ini memberikan keuntungan yang cukup besar untuk bisnis pornografi. Di sisi lain, muncul kegelisahan sosial dan pemerintah juga akan berdampak negatif pada pornografi terutama berkaitan dengan mentalitas generasi muda. Saat ini, pornografi dapat dinikmati oleh semua orang mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan bantuan teknologi sehingga memudahkan orang untuk mengakses berbagai situs pornografi yang ada di internet dan media lainnya.<sup>163</sup>

Saudara Khakim memaparkan bahwa pelanggaran pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu penuh kontroversi bahkan setelah ditetapkan, masih menuai penolakan masyarakat. Pemerintah menganggap bahwa sudah saatnya pornografi untuk diatur secara khusus sehingga tidak akan

<sup>162</sup> Mufti Khakim, *Undang-Undang Pornografi dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana*, (Jurnal hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2016).

<sup>163</sup> Ahmad Sastra, *Indonesia Terancam Lehilangan Generasi Akibat Pornografi*, (publika.co.id, di Upload, 8 Oktober 2019).

menimbulkan kegelisahan di masyarakat meski sudah ada hukum terdahulu yang mengatur terkait pornografi, akan tetapi belum ada yang mengaturnya secara khusus. Bahaya pornografi berperan besar kerusakan mental generasi muda itu menjadi alasan khusus mengapa kasus ini perlu ditetapkan dengan tegas. Lalu bagaimana hal ini bila disikapi dengan sistem politik hukum pidana”.<sup>164</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 3 pendekatan hukum yaitu: Pendekatan yuridis, Pendekatan Kebijakan, Pendekatan nilai. Analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dimulai dari penelitian nilai filosofis, sosiologis dan pembentukan hukum kemudian dengan menggunakan teori-teori tentang politik hukum pidana sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam pandangan politik hukum pidana, perlu dipelajari secara mendalam apakah tindakan pemerintah untuk mengatur pornografi dalam undang-undang khusus dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan prospek masyarakat. Regulasi pornografi perlu diselesaikan dengan sempurna. Teknik pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

## 2. Angga Astian Putra<sup>165</sup>

Jurnal ini mengangkat tema tentang perlindungan anak dan pornografi dengan judul, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet”. Dalam abstrak Sdr.

<sup>164</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Pro dan Kontra Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi*, (Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, 2006).

<sup>165</sup> Angga Astian Putra, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet*, (Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang, 2016).



Angga Astian Putra penelitiannya dilakukan berdasarkan perkara pidana yang melibatkan anak berinisial JJ yang masih dibawah umur membunuh temannya dan melakukan penyodoman kepada MI yang juga masih di bawah umur. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh game online dan pornografi yang ada di Internet.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Angga berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu mengetahui dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberi perlindungan hukum bagi anak terutama untuk kejahatan pornografi, dan bagaimana kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak dari tindak pidana pornografi melalui situs-situs internet dangame online dimasa depan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh saudara Angga dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute aproach* dan *conseptual aproach* dan juga pendekatan komparatif.<sup>166</sup>

Adapun dari hasil penelitiannya ialah hokum sebagai berikut pertama di Indonesia sudah terdapat peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Akan tetapi peraturan tersebut belum benar-benar mampu menanggulangi permasalahan pornografi yang melibatkan anak terutama berkaitan dengan persoalan game online. Hal ini karena belum ada peraturan yang mengatur terkait batasan umur dan filterisasi penggunaan game online di Indonesia, sedangkan kebanyakan game online di dalamnya terdapat unsur-unsur pornografi dan hal ini pasti berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak. Saran saudara Angga dalam penelitian ini diharapkan kedepannya

<sup>166</sup> Alfian Putra Aldi, *KPAI Desak Keminfo Kaji Ulang Aturan Soal Gim Online De,i Anak-Anak*, (Tirto.id, 20 April 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah menerbitkan peraturan terkait batasan umur dan juga membuat sebuah literasi yang lebih baik bagi penggunaan internet dan juga game online yang banyak dinikmati oleh anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>167</sup>

### 3. Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i<sup>168</sup>

Tema jurnal yang di angkat oleh saudara Sigit dan Achmad Sa'i ini ialah tentang hubungan pornografi dengan perkembangan mental remaja, untuk membahas hal tersebut penulis membuat penelitian yang berjudul “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah”.

Penulis memaparkan dan menguraikan lebih dalam tentang pornografi dan akses mudahnya di era globalisasi ini,<sup>169</sup> kemudian tentang remaja dan seksual, remaja dan kenakalannya serta faktor-faktor kenakalan remaja, dan solusi yang dilakukan terhadap kenakalan remaja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Analisis yang digunakan adalah *hermeneutika*, analisis *synthesis*, dan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pornografi dan perkembangan mental remaja seharusnya menjadi perhatian berbagai elemen, seperti orang tua, pendidik, pemuka agama, *stakeholder*, praktisi psikologi, praktisi hukum dan pemerintah serta peran masyarakat. Karena pornografi memberikan dampak negatif bagi perkembangan mental remaja salah satunya ialah dapat memberikan dampak negatif seperti berbuat *a maoral*. Contohnya ialah perzinahan, pelacuran,

<sup>167</sup> Alfian Putra Aldi, *Ibid*.

<sup>168</sup> Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*, (Jurnal Stain Kudus, STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang, 07 Januari 2018).

<sup>169</sup> Bayu Bara, *Analisis Globalisasi yang Berdampak Pada Prilaku Menyimpang Anak Remaja*, (Kompasiana.com, dupload, 24 Februari 2014 diperbarui 24 Juni 2015).

aborsi dan lain-lain. Tentunya semua hal tersebut dapat merusak mental dan masa depan mereka

Solusi yang di tawarkan oleh saudara Sigit dalam penelitiannya ialah 1)ajak remaja melakukan berbagai aktifitas yang positif dan tanamkan nilai tanggung jawab yang tinggi pada remaja hingga ia dapat hidup disiplin dan terdadan, 2) berikan arahan agar remaja pandai dalam bergaul dan memilih teman dan bimbing mereka dengan lingkungan yang baik sebab lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya remaja/anak-anak.

#### 4. Hwian Christianto<sup>170</sup>

Mengangkat tema tentang pornografi dengan judul penelitian, “Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.” Penelitian ini membahas tentang pornografi dalam perpspektif pelanggaran pidana, dan sebagai tolak ukurnya ialah UU Pornografi yakni UU No. 44 Tahun 2008, dan penelitian ini lebih fokus pada analisis pelanggaran norma susila dalam undang undang tersebut.

Dalam abstrak Sdr. Hwian, ia memaparkan bahwasannya peluncuran UU. No.44 Tahun 2008 tentang pornografi di satu sisi memberikan standar hukum untuk tindakan pengambilan pornografi secara komprehensif. Namun di sisi lain, undang-undang pornografi ini sebenarnya tidak merumuskan dengan jelas dan tegas tentang bagaimana mereka akan memutuskan apakah itu dikategorikan sebagai pornografi atau tidak. Interpretasi tentang apa dan bagaimana norma

<sup>170</sup> Hwian Crhistianto, *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, (Jurnal Hukum, Universitas Surabaya, 2016).



moral dianggap, dapat memainkan perannya sebagai pemeriksa penilaian pornografi. Untuk menanganinya, seorang hakim dan pengacara perlu mengetahui apa norma moral, dan bagaimana hal itu dianggap sebagai hukum secara historis atau normatif.

Metode penelitian yang digunakan oleh saudara Hwian ialah metode penelitian *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan *statute aproach*, *conseptual aproach*, dan *comparative aproach*.

Adapun dari penelitian Sdr. Hwian Christianto ialah Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai norma. Baik itu berhubungan dengan norma agama maupun norma susila hingga hal ini menggiring masyarakat Indonesia untuk hidup secara bertanggung jawab dan bermartabat.<sup>171</sup> Dan sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat bangsa Indonesia ini maka diterbitkanlah Undang-undang Pornografi yang bertentangan dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, dan juga karena pornografi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta norma agama bagi masyarakat Indonesia. Norma kesusilaan hendaklah dijunjung tinggi sebab adanya suatu norma dalam masyarakat ialah untuk diikuti dan ditaati. Sehingga pembentukan Undang-undang Pornografi di Indonesia akan mewujudkan rasa keadilan dan ketentraman serta memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di Indonesia yang notabennya merupakan pemegang kekuasaan dan penegak keadilan untuk melindungi jati diri masyarakat Indonesia yang bermartabat.

<sup>171</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A Pendekatan Penelitian

Ketika hendak melakukan penelitian, terdapat tiga grand metode penelitian yang dapat digunakan oleh seorang peneliti, antara lainialah sebagai berikut: pertama penelitian pustaka (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan data atau literatur kepustakaan. Kedua penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan atas dasar data lapangan. Dan yang ketiga adalah *bibliagrapic research*, yang merupakan jenis penelitian yang lebih fokus mengkaji tentang kandungan sebuah teori.<sup>1</sup>

Penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*), melainkan *library research*, sebab bahan-bahan yang diteliti adalah berbagai literatur hukum, dan literatur umum, baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, atau dokumen. Dari berbagai literatur tersebut senantiasa ditemukan konsep dan atau teori, sehingga memungkinkan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan menguji kebenaran konsep dan atau teori tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap buku-buku atau literatur yang menjadi objek penelitian ini.

Penelitian ini berupa penelitian hukum yang bersifat normatif lebih tepatnya *yuridis normatif*, oleh karenanya penulis dapat menggunakan lebih dari satu metode pendekatan dalam meneliti, dimana pendekatan penelitian merupakan

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23.

metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>2</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan juga pendekatan konsep (*conseptual aproach*).<sup>3</sup>

*Statute aproach* dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan hukum pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis undang-undang tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

Pendekatan selanjutnya ialah mengkaji undang-undang tersebut dalam sudut pandang *maqâsid al-syari'ah*, sehingga nantinya akan dapat ditemukan bagaimana keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani perkara pornografi terutama dalam hal perlindungan anak. Selain itu pula penelitian ini dapat memunculkan sebuah gagasan tentang urgensi pembentukan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesai.

## B. Sumber Data

Peter Marzuki memaparkan bahwasannya dalam penelitian hukum tidak mengenal istilah data terutama penelitian hukum yang bersifat *yuridis normatif*. Hal ini dikarenakan penelitian hukum *yuridis normatif* sumber penelitiannya diperoleh dari literatur pustaka atau pun kitab undang-undang sehingga sumber penelitian tersebut dikenal dengan istilah bahan hukum.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 46.

<sup>3</sup> Hajar. M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 68.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang disebut juga dengan bahan sekunder.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder terbagi ke dalam tiga bagian yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum ini mempunyai otoritas dan wajib ada dan berkaitan langsung objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya pembantu ataupun bahan hukum yang berkedudukan sebagai penunjang bahan hukum primer, hingga dapat memperkuat hasil dari pada sebuah penelitian. Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini ialah buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pornografi serta hukum Islam dan *maqashid syariah*.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang bertindak sebagai penjelas atas bahan hukum primer dan juga sekunder. Dalam penelitian ini bahan sekundernya ialah kamus, ensiklopedia, majalah dan lain lain.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Kajian Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah teknik telaah yakni telaah atas arsip dan semua data dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, tesis, atau karya para pakar-pakar yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>7</sup> Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh ialah :

1. Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.
3. Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah *content analysis*. Menurut Barelson *content analysis* merupakan teknik dalam riset yang digunakan untuk menguraikan isi sumber data penelitian dengan jelas secara objektif, sistematis dan kuantitatif.<sup>8</sup> Defenisi ini selanjutnya diuraikan oleh Barelson melalui beberapa asumsi dasar: *Pertama:* asumsi dengan cara melihat hubungan antara konten dan maksud atau tujuan dari isi, dan bisa juga melihat hubungan antara konten dan efek yang muncul. *Kedua:* asumsi selanjutnya ialah

<sup>7</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 10.

<sup>8</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 184

teknik ini digunakan untuk menguraikan sebuah makna dari sumber data. *Ketiga:* teknis analisis ini memfokuskan pada deskripsi kuantitatif. Artinya, suatu makna dari konten yang dibuat dapat dilihat dari frekuensi kemunculan karakteristik dari konten itu sendiri, misalnya melihat tema atau kata apa yang sering muncul atau menjadi pilihan dalam teks.

Analisis konten penelitian ini meliputi analisis bahan hukum, dokumen atau arsip yang disebut dengan teks dengan metode analisis yang integratif, dan secara konseptual. Hal ini penulis lakukan agar dapat menemukan, mengidentifikasi, serta mengolah dan menganalisa bahan hukum tersebut untuk menghasilkan pemahaman makna, signifikansi dan relevansi dari bahan hukum tersebut, terutama dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi metodologi ke Arah Ragam Variatif Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan di dalam tesis ini mengenai Perlindungan Terhadap Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Esensi perlindungan anak pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ialah selaran dengan 3 landasan dasar dibentuknya Undang-undang tersebut yakni sebagai berikut: 1) *Filosofis*: untuk mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, beradab dan menjunjung tinggi norma susila serta norma agama, 2) *Sosiologis*: mencegah pornografi berkembang sebab ia memberi dampak buruk bagi warga negara terkhusus untuk anak-anak dan generasi muda,, 3) *Yuridis*: melarang pornografi guna mewujudkan kepastian hukum dan pengakan keadilan.
2. Konsep perlindungan anak dalam Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur Pada Bab Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Pornografi, dan bertujuan untuk menjaga anak-anak Indonesia dari dekadensi moral, eksploitasi seksual dan juga kejahatan pornografi lainnya, sebab salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Pornografi ialah untuk melindungi anak-anak dan wanita yang banyak menjadi objek kejahatan pornografi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisi hukum Islam mengenai perlindungan anak dari pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau dari sudut kajian *maqâsid al-syari'ah* ialah untuk melindungi kemaslahatan anak itu sendiri yakni dalam menjaga *dharuriat al-khamsh* terutama dalam bidang agama (*hifz al-din*).

#### B. Saran

Diakhir pembahasan tesis ini penulis memberikan saran yang kiranya bisa jadi bahan pertimbangan serta mudah-mudahan bermanfaat pada para pembaca terkait persoalan pornografi dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Kepada umat Islam Indonesia agar memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak dengan menggunakan pendekatan yang dibenarkan oleh agama agar generasi penerus bangsa kita ini terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi.
2. Kepada pemerintah Republik Indonesia kiranya Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi direvisi, hal ini terkait pembolean individu untuk membuat, memiliki atau menyimpan pornografi untuk kepentingan pribadi hal ini tertera pada penjelasan Pasal 4, dan Pasal 6. dan diubah menjadi pelarangan pornografi sepenuhnya selain untuk kepentingan kesehatan, pendidikan dan seni.
3. Kepada pemerintah Republik Indonesia khususnya pada Keminfo marilah kita sama-sama berupaya lebih keras untuk meningkatkan ruang *cyber security* internet di Indonesia agar jalan akses pornografi di jaringan internet Indonesia terblokir dengan baik dan sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Affiah, Neng Dara. 2017. *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmidan, Ziyad Muhammad. 2004. *Maqashid al-Syar'i al-Islamiyah, Dirasah Usuliyyah wa Tathbiqat Fiqhiyya*, Cet. 1, Beirut, Muassasah al-Risalah.
- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Bugha, Mushafa & Muhyiddin Mitsi. 2008. *Al-Wafi Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi*, Terj. Iman Sulaiman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Gazali, Syekh Muhammad A. 2000. *Theatic Commentary on The Qur'an*, Kuala Lumpur, Islamic Book Trust, The International Institute Of Islamic Thught.
- Ali, Muhammad Daud. 2001. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1996. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- \_\_\_\_\_, Ibnu Qayyim 2017. *Tobat dan Inabah*, Terj. Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Lengkap*, cet-14, Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Al-Qarni, Aidh Abdullah. 2006. *Cahaya Zaman*, Terj. Jakarta: Al Qalam Gema Insani.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1991. *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II, Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syaukânî, 1994. *Nail al-Authâr, Syarh Muntaqâ al-Akhhbâr*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. 1998. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, juz II.
- \_\_\_\_\_, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Anam, Khairul. 2010. *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arif, Syamsudin. 2008. *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani.
- Amanda, Ade. 2004. *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi 1978. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bennett, Linda Rae and Sharym Graham Davies. 2013. *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia*, London: Routlage.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bugin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2004. *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Christianto, Hwian. 2016. *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, Jurnal Hukum, Universitas Surabaya.
- Departemen Agama RI, 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djubaedah, Neng. 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Prenada Media.
- Hajar. M, 2015. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru: Suska Press.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al- Nahdah al-‘ Arabiyyah.
- Hilton (JR), Donald L. 2010. *He Rertoreth My Soul: Understanding and Breaking the Chemical and Spiritual Chains of Pornography Addiction*, Forward Press Publishing.
- Husain, Abdul Razaq. 1992. *Islam wa Tiflu*, Translit Azwir Butun, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska.
- Ibrahim, Jhonny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Ike, Pangkalan. 2010. *Whole Brain Training for Phycical Inteligent*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Imawati, Diana dan Meyritha Trifina Sari, 2019. *Studi Kasus Kecanduan Pornografi pada Remaja*, Jurnal Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Jassin, HB dalam Tjipta Lesmana. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jumaidi, Ahmad. 2013. *Porno, Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media*, Gramedia Widiasarana.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- \_\_\_\_\_, Abdul al-Wahab. 1988. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tohchah Mansoer) Edisi Ketiga, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kharoufa, 'Ala' Eddin. 2000. *Philosophy Of Islamic Shariah and its Contribution To The Science Of Contemporary Law*. Islamic Research and Training Institute.
- Lapian, Loisa Magdalene Ghandi Hetty A. Geru. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Zein, Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, cet-1, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Thâhir bin 'Asyûr. 2001. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Amman: Dâr al-Nafâ'is.
- Muttaqin, Zainul. 2015. *Psikologi Anak dan Pendidikan*, Bukupedia.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Harun. 1984. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: UI Press.
- Nur, Muhammad Tahmid. 2018. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: CV. Budi Urama.
- Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Racman, Budi Munawar. 2010. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, A. 2006. *Rahmat Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasyd, Ibnu. 1960. *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Musthafa Babi al Halabi li an-Nashr, Juz I.
- Sa'abah, M. 2001. *Perilaku Seks "Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam"* Jakarta: UI Press.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati.
- Santuri, E.Y. Kanter dan S.R. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penjelasannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif suatu Kajian Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabhan, Zaitunah. 2005. *Pornografi dan Premanisme*, Cet. I; Jakarta: el-Kahfi.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam: Aqîdah wa Syarî'ah*, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966).
- Syam, Firdaus. 2010. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembina Hukum Nasional.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Tim BIP, 2016. *Himpunan Peraturan UU RI, Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2013. *Kitab Lengkap HUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tobroni, H. 2011. *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Utomo, Sigit Tri dan Achmad Sa'i. 2018. *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*, Jurnal Stain Kudus, STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Walid, Muhammad dan Fitratul Uyun, 2011. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Wulansari, Nyi Mas Diane. 2017. *Didiklah Anak Sesuai Zaman*, Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.
- Yatim, Debra H. 2004. "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", *Jurnal Perempuan*, No. 38, 2004, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2006. *Pro dan Kontra Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi*, Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.
- Yustisia, Tim Visi. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Visiamedia Pustaka.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.





## SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa saudara Sholikul Jadiid NIM 21790215631, dengan judul Tesis **Perbandingan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam** dinyatakan lulus Cek Plagiasi sesuai standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah yaitu 35 % dengan menyertakan hasil akhir pengecekan Turnitin.

Dikatakan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 November 2019  
Pustawan

Melda Fitriana, A. Md  
197408032005012006

UIN SUSKA RIAU

1. Diteliti menggunakan Undang-Undang
  - a. Diteliti menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
  - b. Diteliti menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI PENGARUH PORNOGRAFI PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

31%  
SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zadoco.site	2%
2	buzanabuna.blogspot.com	2%
3	imajhe.blogspot.com	1%
4	a-afkar.com	1%
5	media.neliti.com	1%
6	www.scribd.com	1%
7	digilib.uinsby.ac.id	1%
8	repository.uinjkt.ac.id	1%

Internet Source



9

eprints.uns.ac.id

1%

10

fr.scribd.com

1%

11

eupiedu

1%

12

www.ipiteq21.com

1%

13

fr.scribd.com

1%

14

eprints.walisongo.ac.id

1%

15

posisi-sholeh.blogspot.com

&lt;1%

16

Submitted to Padjadjaran University

&lt;1%

17

asy-syiah.uin-suka.com

&lt;1%

18

jurnal.iainpalu.ac.id

&lt;1%

19

repository.ar-raniry.ac.id

&lt;1%

20

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta





UNISKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Website : [www.pasca.unsuka.info](http://www.pasca.unsuka.info) E-mail : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : 1104/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Utama dan  
Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 23 April 2019

Kepada Yth.

1. Dr. H. Hajar, M.Ag (Pembimbing Utama)
  2. Dr. Junaidi Lubis, M.Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:

Nama : Sholikhul Jadiid  
NIM : 21790215631  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)  
Semester : IV (empat)  
Judul Tesis : Perlindungan Anak Atas Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 (Studi Analisis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis.

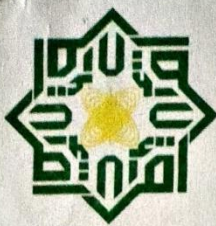
Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
Direktur  
Prof. Dr. Afrizal M. MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 2200/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 17 September 2019

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau  
Di  
Pekanbaru

Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Sholikhul Jadiid
NIM	: 21790215631
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Perlindungan Terhadap Anak Dari Kejahatan Pornografi Pada Pasal 15 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Perpustakaan UIN Suska Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	Kamis 27/2019 /08	Bimbingan BAB I		
2.	Senin 03/2019 /07	Bimbingan BAB II		
3.	Senin 15/2019 /07	Bimbingan BAB III		
4.	Kamis 25/2019 /07	Bimbingan BAB IV		
5.	Senin 05/2019 /08	Bimbingan BAB V dan Abstrak		
6.	Kamis 15/2019 /08	Acc. Test		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15 Agustus ..... 2019

Pembimbing I / Promotor \*

Dr. Hajar, M.A.

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	Senin 29/2019 /07	Bimbingan Bab I		
2.	Kamis 11/2019 /08	Bimbingan Bab II		
3.	Senin 19/2019 /08	Bimbingan Bab III		
4.	Senin 26/2019 /08	Bab IV & V		
5.	Senin 09/2019 /09	Bimbingan Abstrak		
6.		Acc. Test		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 18 Okt ..... 2019

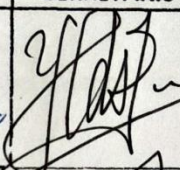

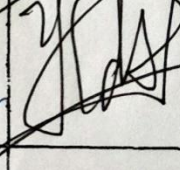
Pembimbing II / Co Promotor \*

Dr. Zuhair, M.A.

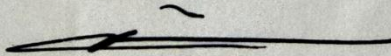


**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHUL JADID  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Pascasarjana S2  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	Senin 24/2019 06	Hukum Menikah ketika Sati yang Menghalangi keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas.		Robi Rendra Tribuana
2	Senin 24/2019 06	Impotensi sebagai Alasan Pasak Nikah Menurut Ibnu Hazam dan Al-Syirazi Dan Al-Muhadzah		Mawardi
3.	Senin 24/2019 06	Hukum Perkawinan Pagitoan Pada Masyarakat Pangkalan Lingsung Kabu Patan Pelalawan dalam Perspektif hukum Islam.		Rosvan. A

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
 Direktur




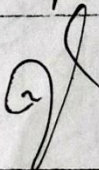
Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHUL JADID  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Hukum Islam (Pascasarjana)  
 PRODI : Hukum keluarga  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	Senin 24/06 2019	Lapas Nikah Menurut Imam Syafi'i dalam Perspektif Maqashid Al-Syar'ah		
2.	Senin 24/06 2019	Hukum Perkawinan Pengitikan pada Masyarakat pangkalan Lesung Kabupaten Pelukawan dalam Perspektif Hukum Islam.		

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
 Direktur



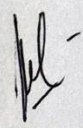
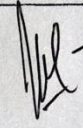
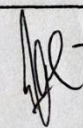
Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sholikhul Jodid  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : MAGISTER S2  
 PRODI : HUKUM ISLAM  
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Jumat 10/ 2019 15	Idah Wanita khuluk Dalam Pasal 155 KHI Ditinjau menurut Maqashid Syariah		
	"	Tinjauan maqashid syariah Tentang adanya Ahli Waris Pengganti		
	"	Nafkah biaya Pengobatan Istri Menurut Imam Nawawi dan Al-Syaukuni		

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
 Direktur



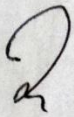


Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHUL JADID  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Hukum Islam S2  
 PRODI : Hukum KELUARGA  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	Rabu 27/2019 /03	Peran Mamak Dalam Memelihara harta warisan pusaka tinggi di kanagarian kamang musak kec. kamang Magek kab. Agama menurut hukum Islam.		Rosa Hafati
2.	Rabu 27/2019 /03	Uhdad Wanita karir yang ditinjau dari segi suami dan tinjau dalam perspektif hukum Islam dan Maqashid Al-syariah		Edi Irawansyah Arvan
3.	Rabu 27/2019 /03	Penerapan Nasab dari hubungan biologis dalam nikah dalam perspektif Fiqh Islam		Oscar Maulana

Pekanbaru, 27 Maret 2019  
 Direktur \_\_\_\_\_

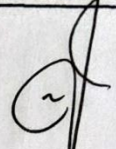
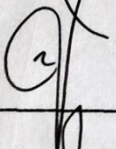
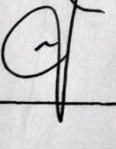
**Prof. Dr. Afrizal, M., MA**  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

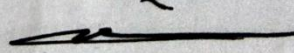


**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHA JADID  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Pascasarjana S2  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	Senin 24/2019 06	lafadz nikah menurut Imam Syafi'i Perspektif Maqashid al-syar'iah		Ali Mustafa
2.	"	Kadar <del>nikah</del> nafkah keluarga me- nurut Ibnu Qudamah		Finta Fajar Fadillah
3.	"	Kewenangan Wali dalam Menentukan Pernikahan Janda yang belum dewasa Menurut Imam Syafi'i		Rahmat Arifin

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
 Direktur

  
 Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar




**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sholikhul Jadiid  
 NIM : 217 902 156 81  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	06/09 2018 Pabu	Tinjauan Hukum Islam Terhadap		
2		Larangan perkawinan pada		
3		panyelesaian larung . kab. Pelalawan.		
4	06/09 2018	Wali Mufbir melakukan pormi		
5		lelahan fungsi izin dari anak		
6		Perampuan analisis Roudhot Maly		
7		syafi'i dan UU Hkm.		
8	06/09 2018	Larangan porropsi pernikahan		
9		Dalam dua kali setahun dgn		
10		satu keluarga yang sama menw		
11		rd satu bugis (aturan adat).		
12	06/09 2018	Shughat akad nikah porropok		
13		tif inum syafi'i dan kolovan		
14		singa bugis kemaslahatan.		
15				

Pekanbaru, 06-09-2018  
 Direktur,

  
**Prof. Dr. Afrizal, M, MA**  
 NIP. 19591015 198903 1 001

**NB:**1.Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2.Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHUL JADID  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Kamis 06/09	Rekonstruksi kurikulum Pasantren pada Pendidikan diniyah formal (PDF) (telah) terhadap Peraturan Menteri Agama RI no 13.	<i>Zh</i> Dr. Masroon, MA	Irwanto
4		Implementasi Metode keteladanan dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap k 13 (studi kasus SMP IT Sebangkinang kota.	<i>Zh</i>	Dary Syafri
5		Implementasi Strategi lembaga Pendidikan Islam dan meningkatkan mutu Pendidikan di pondok pesantren Darussalam karam kabun kec. kabun kab. Rohul.	<i>Zh</i>	Toguh Riana

Pekanbaru, 06 September 2018  
 Direktur



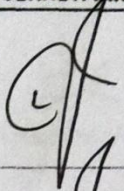
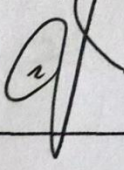
Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOUKHUL JADIHO  
 NIM : 217 902 516 31  
 PROGRAM : MAJESTER (S2)  
 PRODI : HUKUM ISLAM  
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Jum'at 10/05/2019	STUDY KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIST PADA KITAB AL-RAHIQ ALMAKTUL KARYA SYARIF HUNARDI		
	4	ANALISIS Ayat-Ayat AL-QUR'AN TENTANG PROSTITUSI		

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
 Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sholikhul Jafid  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Jumat 07/2018 09	The effect of interview technical to different specialty are vrtif activity at first smester in IAIN Padang sidempur.	<i>zh</i>	NurFekmah
	//	The effect of Using story board techniqe on student descriptive text in triping activity at semor kph sehad I tambah Lefora Rohan.	<i>zh</i>	Susmananti
	//	An exploration of student speaking anxiety in learning English as a foreign language in a state Islamic University in pekanbaru.	<i>zh</i>	Dafika Zamir Putri

Pekanbaru, 07 September 2018  
 Direktur



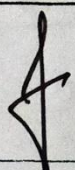


Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198901 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

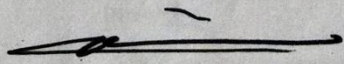


**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SHOLIKHUL JADID  
 NIM : 21790215631  
 PROGRAM : Hukum Islam (Pascasarjana)  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	6/2018 " Selasa	Kewenangan wali dalam menentukan Pernikahan janda di bawah umur menurut Imam Syafi'i.		Rahmad Aripin
	//	Saksi yang Adil dalam pernikahan menurut Imam as-Syafi'i ditinjau dari maqashid syariah.		Mukhlisin
	//	Kupur Juhud dalam pandangan tafsir (telah kata kupur Juhud) dalam kitab tafsir al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili.		Hermansyah

Pekanbaru, 06 November 2018  
 Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Sholikhul Jadiid

Nomor ID : 21790215631

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 13 Maret 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 56

القواعد : 56

القراءة : 53

النتيجة : 540

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahmudin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center





**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الحكوميه الاسلاميه**



**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Sholikul Jadiid

ID Number : 21790215631

Date of Birth : Maret 13, 1994

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 51

Structure & Written Expressions : 52

Reading Comprehension : 48

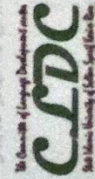
Overall Score : 503

Expire Date : February 19, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19770421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website : [www.pasca.uinsuska.info](http://www.pasca.uinsuska.info) E-mail : [pasca@uin.suska.ac.id](mailto:pasca@uin.suska.ac.id)

nomor : 1104/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
amp : 1 berkas  
perihal : Penunjukan Pembimbing Utama dan  
Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 23 April 2019

Kepada Yth.

1. Dr. H. Hajar, M.Ag (Pembimbing Utama)
  2. Dr. Junaidi Lubis, M.Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:

Nama	: Sholikhul Jadiid
NIM	: 21790215631
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Semester	: IV (empat)
Judul Tesis	: Perlindungan Anak Atas Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 (Studi Analisis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)

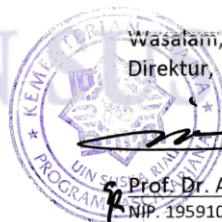
Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,  
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M. MA  
NIP. 19591015 198903 1 001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat : 2200/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
Materi : 1 berkas  
Tentang : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 17 September 2019

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau  
Di  
Pekanbaru

Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Sholikhul Jadiid
NIM	: 21790215631
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Perlindungan Terhadap Anak Dari Kejahatan Pornografi Pada Pasal 15 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Perpustakaan UIN Suska Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	Senin 29/2019 08	Bimbingan Bab I		
2.	Kamis 1/2019 08	Bimbingan Bab II		
3.	19/2019 08	Bimbingan Bab III		
4.	Senin 25/2019 08	Bab IV & V		
5.	Senin 09/2019 09	Bimbingan Akutrik		
6.		Acc. Test		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 18 okt 2019  
Pembimbing II / Co Promotor

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	Senin 06/2019 08	Bimbingan BAB I		
2.	Senin 05/2019 08	Bimbingan BAB II		
3.	Senin 15/2019 08	Bimbingan BAB III		
4.	Kamis 25/2019 08	Bimbingan BAB IV		
5.	Senin 06/2019 08	Bimbingan BAB V dan Akutrik		
6.	Kamis 15/2019 08	Acc. Test		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15 Agustus 2019  
Pembimbing I / Promotor

Dr. Hajar, M.A.S



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sholikhul Jadiid  
 NIM : 217 902 156 31  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	06/09 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap		
2		Larangan perkawinan pada		
3		pangkatkan kesung . kab. Polukawan.		
4	06/09 2018	Wali mujbir melakukan pernikahan		
5		lelaki tunjau 12n dari anak		
6		Perampuan analisis Pandapat Melayu		
7		syafi'i dan UU HAM.		
8	06/09 2018	Larangan korupsi pernikahan		
9		Dalam dua kali setahun dgn		
10		satu keluarga yang sama menu		
11		rat satu bugis (aturan adat).		
12	06/09 2018	Shighat akad nikah persepok		
13		tiq inum syafi'i dan kolovan		
14		singa bugis kemuslihatan.		
15				

Pekanbaru, 06-09-2018  
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU

**Prof. Dr. Afrizal, M, MA**  
 NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: SHOLIKHUL JADID  
: 217 902 156 31  
: Pascasarjana  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
16/09/2018	Rekonstruksi kurikulum Pasantren pada Pendidikan diniyah formal (PDF) (telah terhadap Peraturan Menteri Agama RI no 13.	<u>22</u> Dr. Masroon .MA	IRwan santo
	Implementasi Metode keteladanan dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansi nya terhadap k 13 (studi kasus SMP 17 Sebangkinang kota.	<u>22</u>	Dory syafri
	Implementasi Strategi lembaga Pendidikan Islam dan meningkatkan mutu Pendidikan di pondok pesantren Darussalam Karan kabun kec. kabun kab. Rohul.	<u>22</u>	Toguh Riana

Pekanbaru, 06 September 2018  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001



Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: SHOUKHUL JADIHO  
: 217 902 516 31  
: MAGISTER (S2)  
: HUKUM ISLAM  
: HUKUM KELUARGA

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
10 Mei 2019	STUDY KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIST PADA KITAB AL-RAHIQ ALMAKTUL KARYA SYAFI HUNARDI		
	ANALISIS Ayat-Ayat AL-QURAN TENTANG PROSTITUSI		

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

UIN SUSKA RIAU

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Sholikhul Jadiid  
: 217 902 156 31  
: Pascasarjana  
: Hukum Islam  
: Hukum keluarga

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
07/2018	The effect of interview technical to different specialty are vertif activity at first smester in IAIN Padang sidempuran.	<i>[Signature]</i>	NurSulaiman
	The effect of Usly story board techniqe on student descriptive text in writing activity ar semer hph sehad I tambah kefora Rohan.	<i>[Signature]</i>	Susmananti
11	An exploration of student speaking anxiety in kemampuan English is a foreign language in a state islamic university in pekanbaru.	<i>[Signature]</i>	Dafika Zamzara Putri

Pekanbaru, 07 September 2018  
Direktur

*[Signature]*

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 19890-1001

UIN SUSKA RIAU

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: SHOLIKHUL JADID  
 : 217 902 156 31  
 : Hukum Islam ( Pascasarjana )  
 : Hukum keluarga

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
10/11/2018 Selasa	Kewenangan wali dalam menentukan pernikahan janda di bawah umur menurut Imam Syafi'i.		Rahmad Aripin
11/11/2018 Rabu	Saksi yang Adil dalam pernikahan menurut Imam as-Syafi'i ditinjau dari maqashid syariah.		Mukhlisin
12/11/2018 Kamis	Kupur Juhud dalam pandangan tafsir (telah kata kupur Juhud) dalam kitab tafsir al-munir Dr. Wahbah Zuhaili.		Hermansyah

Pekanbaru, 06 November 2018

Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA

NIP. 19591015 198903 1001

UIN SUSKA RIAU

ini dibawa setiap mengikuti seminar



siswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: SHOLIKHUL JADID  
: 217 902 156 31  
: Hukum Islam (Pascasarjana)  
: Hukum keluarga  
: Hukum keluarga

WAKTU/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
24/06 2019	Lapas Nikah Menurut Imam Syafi'i dalam Perspektif Maqasid Al-Syar'ah		
24/06 2019	Hukum Perkawinan Pagibon pada Masyarakat pangkalan Long Kubu paku Paluhuan dalam Perspektif Hukum Islam.		

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

UIN SUSKA RIAU



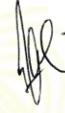
Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

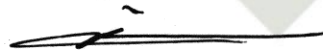


**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

A : Sholikhul Jaidid  
 : 217 902 156 31  
 iRAM : MAGISTER S2  
 II : Hukum Islam  
 ENTRASI : Hukum KELUARGA

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Jumat 10 Mei 2019	Idah Wanita khuluk Dalam Pasal 155 KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah		
"	Tinjauan maqashid syariah Tentang adanya Ahli Waris Pengganti		
"	Nafkah biaya Pengobatan Istri Menurut Imam Nawawi dan Al-Syaubani		

Pekanbaru, 10 Mei 2019  
 Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

UIN SUSKA RIAU

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 dan mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

IA : SHOUKHA JADID  
 GRADE : 217 902 156 31  
 DI : Pascasarjana S2  
 SENTRASI : Hukum Islam  
 : Hukum keluarga

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Senin 24/06/2019	lafadz nikah menurut Imam Syafi'i Perspektif Maqashid al-Syariah		Ali Mustafa
"	Kadar <del>nikah</del> Nafkah keluarga me- nurut Imam Qudamah		Finta Fajar Fadillah
"	Kewenangan Wali dalam Menentukan Pernikahan Janda yang belum dewasa Menurut Imam Syafi'i		Rahmat Arifin

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
 Direktur

  
 Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: SHOLIKHUL JADID  
: 217 902 156 31  
: Hukum Islam S2  
: Hukum KELUARGA

RAM  
ENTRASI

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Rabu 27/03/2019	Peran Mamak Dalam Memelihara harta Warisan pusaka tinggi di kanagarian kamang musrak kec. kamang Magek kab. Agama menurut hukum Islam.		Bisa Hatahi
Rabu 27/03/2019	Uhdad Wanita karir yang ditinjejal mati oleh suami dan tinjav dalam perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-syariah		Edi Irawansyah Arvan
Rabu 27/03/2019	Penetapan Nasab dari hubungan biologis keluar nikah dalam perspektif Fiqh Islam		OSCAR Maulana




Pekanbaru, 27 Maret 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

IA : SHOLIKHUL JADID  
 : 217 902 156 31  
 GRAM : Pascasarjana S2  
 DI : Hukum Islam  
 SENTRASI : Hukum keluarga

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Senin 24/2019 06	Hukum Menikah ketika Sabit yang Menghalangi keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pandapat Imam Malik Bin Anas		Robi Rendra Tribuana
Senin 24/2019 06	Impotensi sebagai Alasan Faskh Nikah Menurut Ibnu Hazam dan Al-Syirazi Dan Al-Muhadzah		Mawardi
Senin 24/2019 06	Hukum Perkawinan Pagitoan. Pada Masyarakat Pangkalan Lingsung Kabu Patan Polakawan dalam Perspektif Hukum Islam.		Rosvan. A

Pekanbaru, 24 Juni 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 dan mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN SUSKA RIAU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية

## SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Sholikhuul Jadiid

Nomor ID : 21790215631

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 13 Maret 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 56

القواعد : 56

القراءة : 53

النتيجة : 540

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0832 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahmudin Syukri, M. Ag  
The Head of Language Development Center



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الحكوومية الإسلامية



### CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Sholikhul Jadiid

ID Number : 21790215631

Date of Birth : Maret 13, 1994

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

#### English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51

Structure & Written Expressions : 52

Reading Comprehension : 48

Overall Score : 503

Expire Date : February 19, 2021



**English Proficiency Test® Certificate** Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19770421 200604 1 003



## BIOGRAFI PENULIS



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Penulis merupakan buah hati pertama dari pasangan suami istri Ayahanda **H. M. Suluri** dan Ibunda **Hj. Siti Anwaroh**, lahir tanggal 13 maret 1994, di Desa Sumber Makur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini penulis memiliki 6 orang saudara yakni 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

### DATA DIRI

NAMA : SHOLIKHUL JADIID  
 NIM : 217 902 156 31  
 TTL : Sumber Makmur, 13-03-1994  
 ALAMAT : JL. Merpati Sakti Gg. Suhada, Panam Kota Pekanbaru  
 NO HP : 082388017446

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nol Besar Desa Sumber Makmur priode (1998-2000)
2. SD Negeri I Desa Sumber Makmur priode (2000-2006)
3. SMP Al-Ikhlas Kota Lubuklinggau priode (2006-2009)
4. SMA Al-Ikhlas Kota Lubuklinggau priode (2009-2012)
5. Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (2012-2016)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Op3m Ponpes Al-Ikhlas Lubuk Linggau (2010-2012)
2. Anggota Hmj (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Muamalah Koordinator Bagian Seni Dan Olahraga (2014-2015)
3. Ketua Panitia Orientasi Mahasiswa Baru Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (2014)
4. Ketua Panitia Perlombaan HUT RI Ke-70 Tahun 2015 KKN UIN SUSKA RIAU Desa Siberakun Kec. Benai Kab. Taluk Kuantan (2015-2016)

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Karyawan bagian administrasi keuangan CV. Anugerah Abadi Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan (2017)

### KARYA ILMIAH

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Bokar (Bahan Olah Karet) antara Toke dengan PT. JOP (Julang Oca Permana) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (2016)
2. Perlindungan Anak dari Pengaruh Pornografi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut Hukum Islam (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau